

EFEKTIVITAS KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL ATAS HUBUNGAN PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TAX AVOIDANCE

{Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Listed di BEI}

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak, dengan moderasi Kepemilikan Institusional. Sampel dalam penelitian sebanyak 12 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu pengamatan 4 tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Dengan metode pemilihan sampel purpose sampling dan analisis data menggunakan regresi berganda dengan Program SPSS ver. 20.

Hasil dari penelitian ini adalah Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak, Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap upaya penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional tidak mampu bertindak sebagai moderasi atas hubungan Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran pajak.

Kata kunci : Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, Penghindaran Pajak

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the Influence Profitability and Family Ownership against Tax Avoidance with moderation Institutional Ownership. Samples are 12 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period of observation 4 years from 2011 until 2014. The sample selection method is purpose sampling and analysis of sample using multiple regression with SPSS Ver. 20.

The result of this study are Profitability (ROA) negative significant to tax Avoidance, Family Ownership did not significant effect to Tax Avoidance. Institutional Ownership is not able to act as moderating the relationship of Profitability, Family Ownership againts Tax Avoidance.

Keyword : Profitability, Family Ownership, Institusional Ownership, Tax Avoidance.

INTERAKSI PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN SAHAM KELUARGA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI

periode 2011 – 2014

1. Hari Ujjantara
2. Syahril Djaddang

Magister Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jl. Raya
Jatiwaringin No. 36, Cipinang Melayu, Jakarta Timur 13620
e-mail : hariujian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan profitabilitas (ROA) dan Kepemilikan Keluarga (KK) terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak diukur menggunakan standar CeTR dengan variabel X1 Profitabilitas, X2 Kepemilikan saham Keluarga. Sampel penelitian terdiri atas perusahaan yang terdaftar di sektor pertambangan BEI dengan pemilihan sampel purpose sampling. Dihasilkan 12 perusahaan yang memenuhi syarat pengujian dengan periode tahun pengamatan selama 4 tahun (2011-2014). Pengujian hipotesis menggunakan Reggression Analysis dengan SPSS ver. 20. Hasil penelitian membuktikan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Penghindaran Pajak

ABSTRACT

This research to analyze relationship of Profitability (ROA) and Family ownership against Tax Avoidance. Tax avoidance was measured using CeTR standard, with profitability as variable X1 and family ownership as variable X2. The research sample consisted of companies listed on Indonesia stock Exchange mining sector with the purpose sampling selection, generated 12 companies qualified testing with the period of observation for 4 years (2011-2014). Hypothesis testing using Reggression Analysis with SPSS ver. 20. Research shows that the profitability of a significant negative effect on the Tax Avoidance. Family ownership no significant effect to Tax Avoidance.

Keywords : Profitability, Family Ownership, Tax Avoidance.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mendapat karunia sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah komoditi minyak bumi yang bisa dieksplorasi dan digunakan sebagai sumber Pendapatan Negara dan digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja dan pembangunan negara. Selama beberapa dekade bangsa dan Negara Indonesia menikmati atas berkah yang dihasilkan dari komoditi minyak bumi ini yang kita kenal dengan komoditi sektor Migas.

Akan tetapi seiring dengan menipisnya cadangan minyak bumi dan merosotnya harga minyak bumi dunia mau tidak mau membuat pemerintah mengalihkan pandangannya untuk mendapatkan sumber pendapatan lain sebagai sumber pembiayaan negara dari sektor non Migas. Salah satu dari sumber pendapatan dari sektor non Migas diperoleh dari pajak yang dibayarkan kepada kas negara. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara sebagai bagian dari penerimaan pendapatan negara. Di Indonesia hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang RI no. 17 Tahun 2003, dimana dalam pasal 11 disebutkan : "Pendapatan Negara terdiri atas pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah"

Dari situ jelas sekali bahwa pajak merupakan pungutan yang disahkan oleh negara sebagai bagian dari penerimaan pendapatan Negara. Bertolak dari hal tersebut menjadi sah pula jika negara mengoptimalkan pendapatannya dari sektor pajak dengan melakukan upaya ekstensifikasi sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat dalam hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik bahwa pada kurun waktu tahun 2014 sektor pajak menyumbang sebesar 78,8 % dari total pendapatan negara (Bps.go.id, 2014). Dalam tahun 2015 penerimaan dari sektor pajak lebih meningkat lagi mencapai Rp. 1.235,8 triliun atau sekitar 83 % dari total penerimaan negara sebesar Rp. 1.489,3 triliun (siaran pers Kemenkeu tanggal 05/01/2016). Melihat peranan penting sektor perpajakan maka sudah berbagai macam usaha yang pemerintah laksanakan guna mendongkrak penerimaan dari sektor pajak,

diantaranya melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan perpajakan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak, memberi kemudahan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, dan memberikan reward berupa pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh. Akan tetapi usaha pemerintah tersebut bukan tanpa kendala bahkan akan berbanding terbalik dengan kepentingan entitas bisnis sebagai salah satu pihak yang diharapkan memberikan sumbangan yang nyata dalam peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Pajak dalam entitas bisnis memiliki pengaruh dalam operasional suatu entitas dimana eksekutif / manager dalam suatu entitas mempunyai pandangan bahwa pajak akan mengurangi jumlah laba bersih / profit yang akan diperoleh perusahaan sehingga perusahaan berkeinginan membayarkan pajaknya serendah mungkin (Simarmata et al, 2012). Perbedaan pandangan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pemerintah mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika memiliki beban pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk mengatasi hal tersebut dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan manajemen pajak untuk memanipulasi laba perusahaan (Wulandari et.al, 2004). Menurut (Simarmata et al , 2012,) manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan akan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan liquiditas yang diharapkan. Salah satu bentuk dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak dimana salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*). Dengan kata lain penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya penghindaran yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimana metode dan tehnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-

kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terhutang. Lebih luas lagi menurut Prasiwi (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penghindaran pajak merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak yang tergolong dalam praktik yang legal, selain untuk mengoptimalkan laba, praktik ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari pergerakan nilai pasar sahamnya. Tetapi dalam beberapa hal tidak tertutup kemungkinan praktek penghindaran pajak dapat menurunkan nilai perusahaan ketika praktek penghindaran yang dilakukan tidak lagi dalam wilayah abu-abu akibat pemeriksaan pajak. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan kegiatan legal untuk meminimalkan beban pajak yang menjadi kewajiban perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham serta memperoleh profitabilitas yang tinggi. Secara tradisional penghindaran pajak merupakan aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Ilmiani et,al, 2014).

Misi utama dari perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan dalam kurun waktu sejak berdirinya perusahaan tersebut, dimana nilai perusahaan dapat dilihat dari harga pasar sahamnya (Simarmata, et al. 2012). Nilai perusahaan yang tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham yang menanamkan modalnya di perusahaan yang di maksud. Semakin tinggi nilai laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi pula return saham yang akan diperoleh para investor. Hal inilah yang akan menjadi barometer atau sinyal positif bagi investor lain untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Kenaikan kesejahteraan investor yang menjadi daya tarik investor lain tersebut mendorong nilai saham perusahaan menjadi semakin tinggi. Dengan kata lain semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin tinggi pula nilai sahamnya di pasar modal (Prasiwi,2015).

Selain dari pergerakan nilai saham, pengukuran atas nilai perusahaan yang lain dengan melihat profitabilitas perusahaan yang dimaksud. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan itu dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Beberapa rasio yang merupakan bagian dari profitabilitas adalah ROA (return on Assets) yang merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh maka akan semakin baik performa perusahaan tersebut. Kinerja yang diukur dengan ROA menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan melalui seluruh aktivitya untuk menghasilkan laba. Oleh karena itu secara singkat ROA merupakan rasio keuntungan bersih pajak yang berarti juga sebagai ukuran untuk menilai pengembalian dari asset yang dimiliki perusahaan. Sehingga jika ROA negatif berarti laba perusahaan dalam kondisi negatif pula, yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa seluruh modal yang diinvestasikan belum mampu untuk menghasilkan laba. Kurniasih dan Sari, (2013) mendefinisikan ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan.

Salah satu yang akan dikupas dalam penelitian ini dalam hubungannya anantara profitabilitas dan penghindaran pajak adalah peran kepemilikan keluarga. Kepemilikan saham keluarga mempunyai pengaruh suara yang kuat dalam perusahaan untuk mengelola perusahaan (anderson, Mansi and Reeb, 2003). Pemegang saham keluarga mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham biasa, berkaitan dengan perhatiannya atas kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka panjang dan reputasi nama keluarga serta perusahaan. Pemegang saham keluarga dalam investasinya berharap mendapat keuntungan secara kontinyu dan bahkan kalo bisa diharapkan juga dapat dinikmati oleh anak keturunannya. Dalam point ini kepemilikan saham keluarga mementingkan maksimalisasi nilai perusahaan (firm value) dibanding pemilik saham biasa.

Sehingga kepemilikan saham keluarga akan bertindak dan mengontrol manajemen supaya tetap bergerak pada koridor yang telah ditentukan dan akan menahan manajemen untuk bertindak menyimpang salah satunya adalah dengan tidak melaksanakan penghindaran pajak yang tentu saja beresiko negatif terhadap nama baik perusahaan.

Dalam penelitian sebelumnya profitabilitas dan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (Prakosa, Kesit Bambang 2014) tetapi penelitian yang lain menghasilkan kesimpulan Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (Rinaldy dan Cheisviyanny, C. 2015), kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (Sirait, Nora Sabrina dan Martani, 2014).

Oleh karena itu penelitian ini penulis memfokuskan untuk meneliti kembali hubungan antara profitabilitas dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak, dengan mengambil sampel perusahaan sektor pertambangan yang listing di BEI dalam kurun waktu pengamatan empat tahun (2011 – 2014) dengan metode purpose sampling dengan kriteria perusahaan yang mempunyai laba bersih sebelum pajak (+) dan dalam kurun tahun pengamatan mempunyai laporan keuangan lengkap.

Telaah Teori, Pengembangan Hipotesis dan Model Penelitian

Teori Agensi (Agency Theory)

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang boleh dibilang memiliki kompleksitas tersendiri yang biasanya didalamnya menyangkut hubungan antar komponen didalamnya. Sebagai suatu organisasi perusahaan mempunyai aturan dan cara dalam membina hubungan antar komponen didalamnya. Dalam hubungan

organisasi perusahaan biasanya pemegang saham memiliki peranan yang utama, tetapi seiring dengan semakin kompleksnya organisasi perusahaan maka pemegang saham biasanya mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada agent yang biasa disebut juga sebagai manager. Oleh Jensen dan Meckling (1976) hal tersebut didefinisikan bahwa principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Agent atau manager inilah yang akhirnya memegang peranan penting dalam pengelolaan perusahaan dengan pengawasan tetap dilakukan oleh pemegang saham / stake holder. Hubungan antara pemegang saham dengan manager dan lemahnya pengawasan oleh pemegang saham dapat menimbulkan masalah yang bersumber dari konflik kepentingan antar agen tidak sesuai dengan tujuan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham. Dalam kenyataannya sering kali manager juga mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham, sehingga terjadilah *agency problem*.

Keuntungan secara sepihak yang diharapkan agen seringkali bertentangan dengan kemauan principal / pemegang saham. Sehingga seringkali agen bertindak oportunistik dengan memanipulasi pendapatan, transaksi dengan pihak yang berhubungan istimewa, pengaturan laba dan penghindaran pajak sebagai tindakan yang sah diambil oleh agen, terlebih pada kondisi pengawasan principal yang lemah.

Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory)

Watts and Zimmerman (1986) menjelaskan faktor faktor ekonomi tertentu bisa berhubungan dengan perilaku manager atau pembuat laporan keuangan. Terdapat tiga hipotesis yang melingkupi positive accounting theory yang mendorong tindakan yang diambil oleh manager yaitu The Bonus Plan Hypothesis, The Debt to Equity Hypothesis, The Political Cost Hypothesis.

Profitabilitas

Prakosa, Bambang Kesit (2014) menggambarkan profitabilitas merupakan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dimilikinya, yang lebih dikenal sebagai ROA (Return On Assets). Dengan ROA akan dapat diukur sejauh mana efektivitas perusahaan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat ROA yang dicapai akan semakin tinggi pula keuntungan yang akan diperoleh.

Kurniasih dan Sari (2013) menghitung perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

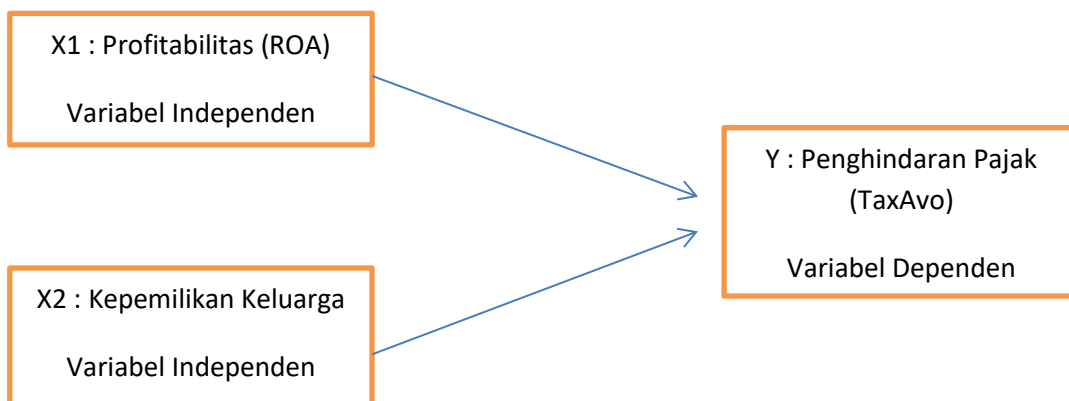
Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan saham keluarga dalam suatu perusahaan merupakan suatu kepemilikan yang biasanya secara khusus dipegang oleh pendiri utama atau pendiri pertama perusahaan, karenanya kepemilikan keluarga mempunyai karakteristik yang unik yang biasanya berbeda dengan kepemilikan saham yang lain. Menurut Anderson, Mansi and Reeb (2003) pemilik saham keluarga mempunyai pengaruh suara yang kuat dalam perusahaan dengan motif yang kuat pula dalam mengelola perusahaan. Karakteristik yang membedakan dengan pemilik saham keluarga dengan pemilik saham yang lain selain saham yang diwariskan adalah perhatian keluarga atas kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang dan perhatian atas reputasi nama keluarga dan nilai perusahaan.

Starga Lamora, Vince dan Kamaliah (2013) mendefinisikan kepemilikan keluarga merupakan saham oleh individu maupun perusahaan (yang kepemilikannya tercatat) yang bukan merupakan perusahaan publik. Dan indikator pengukuran yang digunakan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Keluarga} = \frac{\text{Jumlah Saham Keluarga}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Model Penelitian



Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteris tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya agar diperoleh sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian atau dengan bahasa lain *purposive sampling* adalah tehnik pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu, pengambilan data yang dianggap sesuai dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dan dalam tehnik pemilihan ini tidak dilakukan secara acak, tapi dengan tehnik pertimbangan (*judgement sampling*).

Adapun kriteria penentuan dan pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan sektor pertambangan sesuai dengan kategori yang dikembangkan oleh BEI yang tercantum dalam IDX Fact Book dan tidak mengalami delisting selama kurun waktu 2011 – 2014.
2. Perusahaan sektor pertambangan yang telah menerbitkan serta mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember.
3. Laporan Keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah dan perusahaan tidak berpindah sektor selama tahun yang diamati.
4. Perusahaan sektor pertambangan yang diteliti tidak mempunyai distorsi atas manfaat atau pengembalian pajak selama tahun yang diamati.
5. Perusahaan sektor pertambangan yang mempunyai pre-tax –income yang positif
6. Perusahaan sektor pertambangan yang diteliti mempunyai struktur kepemilikan saham keluarga, dan pengungkapan pembayaran pajak selama periode tahun 2011-2014.

Analisa Hasil dan Pembahasan.

Tabel 1.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	48	,001	,466	,09190	,098734
KK	48	,000	,985	,40496	,299486
CeTR	48	,018	,898	,32498	,172286
Valid N (listwise)	48				

Keterangan :

- ROA : Return On Asset proksi dari Profitabilitas Variabel Independent (X1)
- KK : Kepemilikan Keluarga, Variabel Independent (X2)
- CeTR : Penghindaran pajak, Tax Avoidance, Variabel dependent (Y)

Dari hasil tabel statistik deskriptif diatas dengan data sampel sejumlah 48 dari 12 perusahaan yang diolah didapat gambaran sebagai berikut :

- 1.) Profitabilitas yang diproyeksikan sebagai ROA memberikan gambaran bahwa dari total aset yang dimiliki 12 perusahaan sampel hanya mampu menghasilkan profitabilitas rata-rata sebesar 0,09190 atau hanya 9,00 % dengan nilai minimum sebesar 0,001 dan nilai maksimum sebesar 0,466, hal ini berarti dari 12 perusahaan terdapat satu perusahaan yang hanya mampu menghasilkan profitabilitas sebesar 0,1 % yaitu PT. Citatah Tbk pada tahun 2013 dan sebaliknya ada pula satu perusahaan yang mampu mendayagunakan aset yang dimilikinya sehingga berhasil memperoleh profitabilitas maksimum sebesar 46,6 % yang ditunjukkan oleh PT. Resources Alam Indonesia Tbk pada tahun 2011. Perusahaan yang lain memproyeksikan profitabilitas $\geq 0,3$ % pada periode pengamatan tahun 2011 sampai dengan 2014. Dari standar deviasi sebesar 0,098734 menunjukkan tidak ada perusahaan sampel yang berkinerja buruk.

- 2.) Kepemilikan Keluarga (KK) dalam perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 0,40496 yang menggambarkan rata-rata besarnya kepemilikan saham keluarga 40,50 % dan kepemilikan saham keluarga minimum digambarkan sebesar 0,000 atau 0 % yang ditunjukkan oleh PT. Timah Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2011 dan 2012, pada tahun 2013 dan 2014 ada kepemilikan saham keluarga yang diberikan pada direksi tetapi jumlahnya tidak signifikan dengan total saham beredar sehingga hasilnya tetap 0,000. Kepemilikan saham keluarga yang tertinggi di gambarkan dengan nilai sebesar 0,985 atau 98,50 % yang dimiliki oleh PT. Petrosea Tbk pada tahun 2011.

3.) Proksi CeTR yang merupakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) atas perusahaan yang diteliti mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,32498 dari standar deviasi 0,172286 atau senilai 32,50 %. Hal ini dapat membuktikan bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia cukup kecil dengan rata-rata hanya 32,50 %. Adapun nilai terendah / minimum dari CeTR yang digambarkan tabel sebesar 0,018 atau nilai pembayaran pajak sebesar 0,18 % diproyeksikan oleh PT. Ratu Prabu Energy Tbk pada tahun 2013, sedang nilai CeTR tertinggi atau maksimum sebesar 0,898 atau nilai pembayaran pajak sebesar 89,8 % diproyeksikan oleh PT. Petrosea Tbk pada tahun 2014. Semakin rendah nilai CeTR yang diperoleh mengindikasikan semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan begitupun sebaliknya semakin tinggi nilai CeTR mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut menekan terjadinya penghindaran pajak.

Tabel 2.
Hasil uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		48
	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,16078009
Most Extreme Differences	Absolute	,163
	Positive	,151
	Negative	-,163
Kolmogorov-Smirnov Z		1,131
Asymp. Sig. (2-tailed)		,155

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari data tabel 2. tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digambarkan berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,155 yang menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10 (Sig. 0,155 > 0,10).

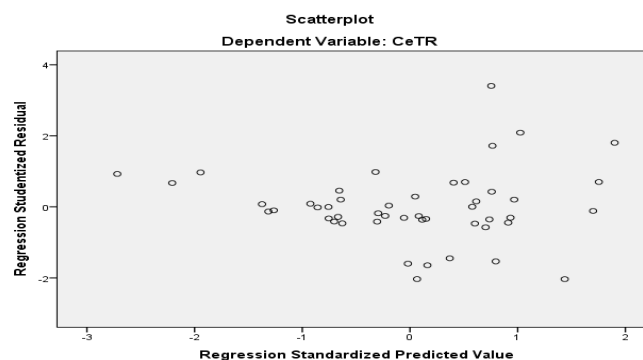
Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,517	,068		7,640	,000		
SQRT_ROA	-,691	,188	-,601	-3,671	,001	,636	1,573
SQRT_KK	-,021	,095	-,038	-,220	,827	,573	1,747

a. Dependent Variable: CeTR

Hasil yang diperlihatkan pada tabel 3. diatas diketahui bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari variabel Independen ROA (X1) sebesar 1,573, sedang variabel Independen KK (X2) sebesar 1,747, dimana dua-duanya menunjukkan angka < 10. Adapun nilai tolerance dari ROA (X1) adalah 0,636 sedangkan KK (X2) mempunyai nilai 0,573 keduanya menunjukkan nilai > 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Gambar 1.
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari pola gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar diatas, dibawah dan disekitar angka 0 (nol), serta tidak membentuk suatu pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 4.
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,479 ^a	,229	,177	,156334	,229	4,360	3	44	,009	2,099

a. Predictors: (Constant), KI, SQRT_ROA, SQRT_KK

b. Dependent Variable: CeTR

Dari hasil uji pada tabel 4. menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,099, nilai batas atas (du) dihitung dengan $(k;n-k) = (2:48-2) = (2 : 46)$ dalam tabel sebesar 1,628, selanjutnya $t\text{-hitung} > t\text{-tabel} = 2,099 > 1,628$. Dengan demikian asumsi data dalam penelitian benar tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5.
Hasil Uji Kelayakan Model

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,373	4	,093	3,924	,008 ^b
	Residual	1,022	43	,024		
	Total	1,395	47			

a. Dependent Variable: CeTR

b. Predictors: (Constant), SQRT_ROA, SQRT_KK

Dari data output spss 20 yang dihasilkan dalam tabel 5. dapat dilihat signifikansi (sig.) menunjukkan angka sebesar 0,008 masih dibawah 0,050. F-hitung sebesar 3,924, sedang di dalam tabel F-tabel dihtuung dari $d = (k;n-k) = (2:48-2) = (2:46)$ sehingga $d = 50$, $\alpha = 0,5$ maka didapatkan data F-tabel = 3,180. Dengan

demikian $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ dan kesimpulannya adalah ROA dan KK secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CeTR).

Tabel 6.
Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,479 ^a	,229	,177	,156334

a. Predictors: (Constant), SQRT_ROA, SQRT_KK

b. Dependent Variable: CeTR

Dari data output tabel diatas diketahui bahwa besaran adjusted R^2 adalah 0,479 yang berarti sebanyak 47,9% varian Tax Avoidance dapat dijelaskan oleh variabel independen ROA, dan KK. Sedangkan sisanya sebanyak 52,10 % dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Standard error of the estimate diketahui sebesar 0,156334 yang berarti semakin tepat variabel independen memprediksi variabel dependen, karena semakin kecil nilai SEE semakin besar mempengaruhi variabel dependen. Adjusted R Square 0,229 berarti sebanyak 22,9 % tax avoidance mampu diprediksi oleh profitabilitas dan kepemilikan keluarga sisanya 77,10 % diprediksi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 7.
Hasil Uji - t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,499	,144		3,460	,001
	SQRT_ROA	-,522	,158	-,453	-3,311	,002
	SQRT_KK	-,084	,149	-,152	-,563	,576

a. Dependent Variable: CeTR

Dari formasi tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Uji – t pada penelitian ini adalah :

1. Nilai signifikansi untuk ROA variabel X1 adalah 0,002 yang berarti < dari 0,05 atau < dari 0,10. Nilai t-Hitung untuk variabel ROA (X1) sebesar 3,311 (negatif) dan nilai t-Tabel $(\alpha/2:n-k-1) = (0,05/2 : 48-2-1) = (0,03 : 45) = 2,0141$, sehingga t-hitung masih lebih besar dari t-tabel (3,311 > 2,014) dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ROA (X1) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Tax Avoidance. Dari output coefficients (β) tabel diatas dapat dilihat nilai regresi variabel ROA sebesar 0,522 dan bernilai negatif sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance, dengan arti lain semakin tinggi tingkatan profitabilitas yang dicapai perusahaan semakin menurun tingkat penghindaran pajaknya.

Dengan demikian hipotesis 1 : ***Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, diterima.***

2. Nilai signifikan untuk KK (X2) sebesar 0,576 (> 0,10) dan t-hitung sebesar 0,563 bernilai negatif sehingga dapat disimpulkan T-tabel $(\alpha/2:n-k-1) = (0,10/2 : 48-2-1) = (0,05; 45) = 1,6794$ sehingga t-hitung < t-tabel (0,563 < 1,6794) hasilnya bahwa kepemilikan keluarga (KK) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) dalam arti lain KK (X2) bukan merupakan variabel penjelas dari Tax Avoidance.

Dengan demikian hipotesis 2 : ***Kepemilikan Keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, ditolak.***

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan karena karakteristik perusahaan pertambangan yang berbeda atau sebab lain yang dapat di bahas pada penelitian selanjutnya.

Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Tujuan awal dari penelitian ini adalah untuk meneliti kembali pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak dimana pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada perusahaan manufaktur dengan hasil Profitabilitas (ROA) dan Kepemilikan Keluarga (KK) berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Dan hasil yang didapat dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance (penghindaran pajak), hal ini membuktikan semakin tinggi profitabilitas perusahaan sektor pertambangan akan semakin kecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.
2. Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance (penghindaran pajak), membuktikan bahwa kepemilikan keluarga bukan sebagai variabel yang menjelaskan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini tentu saja masih jauh dari sempurna dan tidak tertutup adanya keterbatasan yang melingkupinya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meminimalisir keterbatasan yang ada. Beberapa saran yang bisa penulis ungkapkan diantaranya :

1. Disarankan penelitian mendatang melakukan penelitian selain variabel ROA (Profitabilitas), seperti Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Mayoritas, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen, Kualitas Audit sebagai mekanisme kontrol dalam melakukan penghindaran pajak.

2. Melanjutkan tahun sampel dari 2015 dan 2016 dan memperluas cakupan sampel penelitian seperti perusahaan Perbankan, Jasa, Otomotif ataupun manufaktur supaya hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi terhadap upaya penghindaran pajak.
3. Menggunakan pengukuran penghindaran pajak selain CeTR. Seperti menggunakan Tax Shield dan Agressivitas Pajak.

Daftar Referensi

- Anderson, R., Mansi, S., Reeb, D. (2003). Founding-family ownership and the agency cost of debt. *Journal of Financial Economics* 68, 263-285.
- Anissa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih. (2012). "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance" *Jurnal Akuntansi dan Auditing, Volume No. 2*
- Budiharto, Sutrisno. (2013). Indonesia ini Kaya, Tapi Kenapa Miiskin ; Ada Apa dengann Tambangnya ?
<http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2013/12>
- Budiman dan Setiyono, (2012). "Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
- Chen Shuping, Cheng Qiang; and Shevlin Terry (2010) "Are Family firms more Tax Aggressive than non-family firms ? *Journal of Financial Economics. Vol 91,*
- Desai, M.A., and Dharmapala, D . (2006). "Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics, 79,*
- Dyreng, Scott D.; Hanlon, Michelle; Maydew Edward L, (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance, *The Accounting Review, 83, 61-82.*
- Faccio, Mara . (2006). Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96 (1);
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoror
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976). "Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics, Vol 3, h. 305-360*
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari (2013). "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance, *Jurnal Akuntansi Vol. 8 No. 1.*

- La Porta, Rafael; Lopez-De Silanes, (1999), Corporate Ownership Around The World, *Journal of Finance*, 54, 471-518.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana, (2004). " Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2 (2014) : 525-539
- Mangoting, Yenni, (1999). "Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif meminimalkan Pajak". *Jurnal Akuntansi Keuangan Vol. 1 No. 1*, Mei 1999: 43-53.
- Ngadiman dan Christiany Puspitasari. (2004). "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2010-2012). *Jurnal Akuntansi Vol. 18 No. 03, September 2014: 408-421*.
- Pohan, Hotman. T. (2009) "Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik" *Jurnal Informasi, Perpajakan dan Akuntansi dan Keuangan Publik* (4) 113-135.
- Prakosa, Kesit Bambang (2014). " Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia" *SNA 17 Mataram, September 2014*.
- Prasiwi, Kristantina Wahyu (2015), "Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi" *Skripsi Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Diponegoro*. Tidak dipublikasikan Semarang 2015
- Rinaldi, dan Cheisviyanny, C. (2015) "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013) *SNEMA Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang 2015*
- Sari, D. K., dan Martani, D. (2010) "Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 13*, Padang, hal. 1-34
- Sirait, Nora Sabrina dan Martani, D. (2014) "Pengaruh Perusahaan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia" *SNA 17 Mataram Lombok, 24-27 September 2014*
- Suandy, Erly. (2008) "*Perencanaan Pajak*". Edisi 4, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 pasal 11. Tentang Keuangan Negara. Undang –undang Republik Indonesia*

Nomor 16 Tahun 2009. Perubahan ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Jakarta;Kemenkeu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18. Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta: Kemenkeu

Watts, RL., and J. L. Zimmermen. (1986). "*Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*". *The Accounting Review*, 60 (1): 131-156.

Zain, Mohammad. (2008) "*Manajemen Perpajakan*" Edisi 3, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

http://www.bps.go.id/link_Tabel_Statis/view/id/1286.indo_13_1

<http://www.idx.co.id>

Siaran pers Kemenkeu Tanggal 05/01/2016

[http://www.pajak.go.id / tax amnesty](http://www.pajak.go.id/tax_amnesty)

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. GAP Penelitian Sebelumnya	9
1.3. Rumusan Masalah Penelitian	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian	11

BAB II TELAAH TEORI, LITERATURE, PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Telaah Teori / Justifikasi Theory	13
2.1.1. Terori Agensi (Agency Theory)	13
2.1.2. Teori Akuntansi Positif (Positive Theory)	16
2.1.3. Profitabilitas	18
2.1.4. Kepemilikan Keluarga	19
2.1.5. Kepemilikan Institusional	23
2.1.6. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) ...	26
2.2. Ikhtisar Penelitian Terdahulu	32
2.3. Pengembangan Hipotesis	33

2.3.1. Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak / Tax Avoidance	33
2.3.2. Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak / Tax Avoidance ..	34
2.4. Kerangka Pemikiran, Model Penelitian Empiris Dan Teoritis	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Design Penelitian	38
3.1.1. Ruang Lingkup Penelitian	38
3.2. Populasi dan Sampel	38
3.3. Metode Penentuan Pemilihan Sampel	39
3.4. Metode Pengumpulan Data	41
3.5. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	42
3.5.1. Variabel Dependen (Y)	43
3.5.2. Variabel Independen (X)	44
3.5.2.1. Profitabilitas (X1)	44
3.5.2.2. Kepemilikan Keluarga (X2)	44
3.5.3. Variabel Moderating	46
3.6. Operasional Variabel	47
3.7. Metode Analisis Data	48
3.7.1 Statistik Diskriptif	48
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	49
1.) Uji Normalitas	49
2.) Uji Multikolinieritas	50
3.) Uji Autokorelasi	51
4.) Uji Heteroskedastisitas	52
3.7.3 Uji Hipotesis dengan MRA	52
3.7.4 Uji Statistik f	55

3.7.5. Uji Statistik t	55
------------------------------	----

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek dan Sampel Penelitian	56
4.2. Statistik Deskriptif	60
4.3. Uji Asumsi Klasik	63
4.3.1. Uji Normalitas	63
4.3.2. Uji Multikolinieritas	67
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas	68
4.3.4. Uji Autokorelasi	69
4.4. Pengujian Hipotesis dan Hasil Statistik	70
4.4.1. Uji Signifikansi Kelayakan Model (uji-F)	70
4.4.2. Uji Koefisien Determinan (R^2)	72
4.4.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (uji-t)	73
4.4.4. Uji Moderate Regression Analysis (MRA)	75
4.5. Pembahasan Hasil	78
4.5.1. ROA berpengaruh signifikan negatif Terhadap Penghindaran Pajak	78
4.5.2. Kepemilikan Keluarga tidak berpenga- ruh signifikan terhadap penghindaran pajak	79
4.5.3. ROA tidak berpengaruh signifikan ke-	

	tika di moderasi oleh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran Pajak	80
4.5.4.	Kepemilikan Keluarga tidak berpenga- ruh signifikan terhadap penghindaran pajak ketika di moderasi oleh Kepemi- likan Institusional	81
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1. Kesimpulan Hasil Penelitian	82
	5.2. Keterbatasan dan Saran	83
	Daftar Pustaka	84
	Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mendapat karunia sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah komoditi minyak bumi yang bisa dieksplorasi dan digunakan sebagai sumber Pendapatan Negara dan digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja dan pembangunan negara. Selama beberapa dekade bangsa dan Negara Indonesia menikmati atas berkah yang dihasilkan dari komoditi minyak bumi ini yang kita kenal dengan komoditi sektor Migas.

Akan tetapi seiring dengan menipisnya cadangan minyak bumi dan merosotnya harga minyak bumi dunia mau tidak mau membuat pemerintah mengalihkan pandangannya untuk mendapatkan sumber pendapatan lain sebagai sumber pembiayaan negara dari sektor non Migas. Salah satu dari sumber pendapatan dari sektor non Migas diperoleh dari pajak yang dibayarkan kepada kas negara. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara sebagai bagian dari penerimaan pendapatan negara. Di Indonesia hal ini ditegaskan dalam Undang Undang RI no. 17 Tahun 2003, dimana dalam pasal 11 disebutkan : "Pendapatan Negara terdiri atas pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah"

Dari situ jelas sekali bahwa pajak merupakan pungutan yang disahkan oleh negara sebagai bagian dari penerimaan pendapatan Negara. Bertolak dari hal tersebut menjadi sah pula jika negara

mengoptimalkan pendapatannya dari sektor pajak dengan melakukan upaya extensifikasi sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat dalam hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik bahwa pada kurun waktu tahun 2014 sektor pajak menyumbang sebesar 78,8 % dari total pendapatan negara (Bps.go.id, 2014). Dalam tahun 2015 penerimaan dari sektor pajak lebih meningkat lagi mencapai Rp. 1.235,8 triliun atau sekitar 83 % dari total penerimaan negara sebesar Rp. 1.489,3 triliun (siaran pers Kemenkeu tanggal 05/01/2016) Melihat peranan penting sektor perpajakan maka sudah berbagai macam usaha yang pemerintah laksanakan guna mendongkrak penerimaan dari sektor pajak, diantaranya melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan perpajakan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak, memberi kemudahan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, dan memberikan reward berupa pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh. Akan tetapi usaha pemerintah tersebut bukan tanpa kendala bahkan akan berbanding terbalik dengan kepentingan entitas bisnis sebagai salah satu pihak yang diharapkan memberikan sumbangan yang nyata dalam peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Pajak dalam entitas bisnis memiliki pengaruh dalam operasional suatu entitas dimana eksekutif / manager dalam suatu entitas mempunyai pandangan bahwa pajak akan mengurangi jumlah laba bersih / profit yang akan diperoleh perusahaan sehingga perusahaan berkeinginan membayar pajaknya serendah mungkin (Simarmata, 2012). Perbedaan pandangan antara kepentingan perusahaan dengan

kepentingan pemerintah mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika memiliki beban pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk mengatasi hal tersebut dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan manajemen pajak untuk memanipulasi laba perusahaan (Wulandari et.al, 2004). Menurut Simarmata, 2012, manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan akan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan liquiditas yang diharapkan. Salah satu bentuk dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak dimana salah satunya adalah penghindaran pajak (tax avoidance)

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*). Dengan kata lain penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah upaya penghindaran yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimana metode dan tehnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terhutang. Lebih luas lagi menurut Prasiwi (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penghindaran pajak merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak yang tergolong dalam praktik yang legal, selain untuk mengoptimalkan laba, praktik ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari pergerakan nilai pasar sahamnya. Dari beberapa

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan kegiatan legal untuk meminimalkan beban pajak yang menjadi kewajiban perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham serta memperoleh profitabilitas yang tinggi. Secara tradisional penghindaran pajak merupakan aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Ilmiani et,al, 2014).

Misi utama dari perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan dalam kurun waktu sejak berdirinya perusahaan tersebut, dimana nilai perusahaan dapat dilihat dari harga pasar sahamnya (Simarmata, 2012). Nilai perusahaan yang tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham yang menanamkan modalnya di perusahaan yang di maksud. Semakin tinggi nilai laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi pula return saham yang akan diperoleh para investor. Hal inilah yang akan menjadi barometer atau sinyal positif bagi investor lain untuk menanamkan modalnya diperusahaan tersebut. Kenaikan kesejahteraan investor yang menjadi daya tarik investor lain tersebut mendorong nilai saham perusahaan menjadi semakin tinggi. Dengan kata lain semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin tinggi pula nilai sahamnya di pasar modal (Prasiwi,2015).

Pengukuran atas nilai perusahaan salah satunya dengan melihat profitabilitas perusahaan yang dimaksud. Profitabilitas suatu perusahaan

menggambarkan kemampuan perusahaan itu dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Beberapa rasio yang merupakan bagian dari profitabilitas adalah ROA (return on Assets) yang merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh maka akan semakin baik performa perusahaan tersebut. Kinerja yang diukur dengan ROA menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan melalui seluruh aktivitya untuk menghasilkan laba. Oleh karena itu secara singkat ROA merupakan rasio keuntungan bersih pajak yang berarti juga sebagai ukuran untuk menilai pengembalian dari asset yang dimiliki perusahaan. Sehingga jika ROA negatif berarti laba perusahaan dalam kondisi negatif pula, yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa seluruh modal yang diinvestasikan belum mampu untuk menghasilkan laba. Kurniasih dan Sari, (2013) mendefinisikan ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan.

Dalam usahanya mempertahankan nilai perusahaan supaya tetap stabil tinggi dan memiliki profitabilitas yang tinggi pula di mata investor, maka manajemen memiliki berbagai alternatif yang bisa ditempuh, salah satunya dengan manajemen pajak berupa tindakan penghindaran pajak (Tax Avoidance). Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak inilah yang menimbulkan konflik kepentingan dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit sekaligus unik, dimana dalam salah

satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan tetapi disisi lain penghindaran pajak merupakan satu hal yang tidak diinginkan

Salah satu hal yang fenomenal pada masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini (Agustus 2016) untuk mengcounter praktek penghindaran pajak adalah peluncuran kebijakan **Tax Amnesty** yang memberikan keluasaan pada para wajib pajak untuk melakukan pengungkapan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan membayar uang tebusan tarif pajak yang secara proporsional perbulan lapor dengan kisaran tarif 2 % sampai dengan akhir bulan September 2016, tarif 3 % sampai dengan akhir bulan Desember 2016, tarif 5 % untuk pengungkapan yang dilaporkan sampai dengan bulan Maret 2017 bagi deklarasi dalam negeri. Sedang untuk deklarasi luar negeri berlaku tarif 4 % sampai dengan 30 September 2016, tarif 6 % sampai dengan 31 Desember 2016, dan tarif 10 % sampai dengan 31 Maret 2017. Adapun untuk UMKM dengan deklarasi harta s/d 10 milyar dikenakan tarif 0,5 % dari nilai harta sampai dengan 31 Maret 2016, untuk UMKM dengan deklarasi harta > 10 milyar berlaku tarif 2 % sampai dengan 31 Maret 2017.

Selain dengan pemerintah tindakan penghindaran pajak juga mengalami konflik kepentingan (*Interesting conflict*) antara Investor (*principle*) Manager (*agent*) yang diakibatkan adanya asimetri informasi yang selanjutnya dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara *principle* dengan *agent* mengenai kebijakan penghindaran pajak. Konflik semacam

ini disebut *agency problem* atau masalah *agency* (Jensen dan Meckling, 1976). Perspektif investor (*principle*) yang menempatkan dananya pada saham perusahaan akan mempunyai penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak dan selanjutnya akan menarik keluar dananya dari saham perusahaan tersebut, karena kekhawatiran atas dampak dari penghindaran pajak yang beresiko seperti membutuhkan tambahan biaya langsung atas kegiatan penghindaran pajak, kemungkinan hukuman potensial jika diketahui kegiatan penghindaran pajak merupakan tindakan ilegal (karena berada pada *grey area*) dan sebagainya.

Tetapi dalam perkembangan literatur empiris ada yang menggabungkan masalah keagenan dalam menganalisis penghindaran pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010), menurut kedua peneliti melalui efisiensi pajak, maka kesejahteraan pemegang saham akan meningkat. Karenanya struktur kepemilikan menjadi faktor penting penentu penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2008). Hanlon dan Heitzman mendefinisikan penghindaran pajak secara luas dengan pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion* dan *tax sheltering*.

Dalam praktek perusahaan keluarga terdapat masalah keagenan yang unik juga yaitu masalah konflik yang lebih besar antara pemegang

saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Sedang konflik yang relatif lebih kecil terjadi antara pemilik dan manajer. Dalam hal ini posisi pemegang saham mayoritas yang notabene sang pemilik perusahaan keluarga berdampak pada penghindaran pajak. Pemilik saham keluarga memiliki pengaruh suara yang kuat dalam perusahaan dan motif yang sangat kuat untuk mengelola perusahaan (Anderson, Mansi dan Reeb, 2003). Pemegang saham keluarga mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham biasa, berkenaan dengan perhatiannya atas kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka panjang dan reputasi nama keluarga dan perusahaan. Dengan kata lain point yang pertama pemegang saham keluarga mengharapkan dan peduli atas kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka panjang karena pemegang saham keluarga telah menginvestasikan atau mendiversifikasikan portopolionya dan mengharap mendapatkan keuntungan secara kontinyu bahkan kalo bisa diharapkan dapat dinikmati juga secara turun temurun oleh keturunannya. Dalam point pertama ini pemegang saham keluarga mementingkan maksimalisasi atas nilai perusahaan (firm value) dibanding pemegang saham biasa. Sedang dalam point kedua pemegang saham keluarga peduli pada reputasi nama baik keluarga dan perusahaan, kepedulian atas nama baik keluarga dan perusahaan mendorong pemegang saham keluarga untuk bertindak dan mengontrol manajemen agar bertindak sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan, dan menahan manajemen supaya tidak bertindak yang menyimpang, salah satunya dengan tidak melaksanakan penghindaran

pajak. Karena penghindaran pajak mempunyai resiko negatif atas nama baik keluarga dan perusahaan.

1.2. GAP Penelitian sebelumnya

Dalam studi pustaka atas penelitian Kesit Bambang Prakosa (2014), disimpulkan bahwa Profitabilitas dan kepemilikan saham keluarga berpengaruh *negatif* terhadap penghindaran pajak. Tetapi ada juga satu penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh *positif* terhadap praktek penghindaran pajak (Rinaldy & Charoline Cheisviyanny, 2015) Selain itu dalam penelitian pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tax avoidance ada juga penelitian yang memberikan kesimpulan akhir bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan *positif* terhadap penghindaran pajak di Indonesia (Nora Sabrina Sirait & Dwi Martani, 2014)

Oleh karena itu dalam penelitian ini kami memfokuskan pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak di Indonesia dengan menambahkan Kepemilikan Institusional yang merupakan proksi dari Good Governance sebagai pemoderasi.

Bertolak dari GAP permasalahan diatas maka penulis termotivasi untuk mengangkat judul **“Efektivitas Kepemilikan Institusional atas Hubungan Profitabilitas dan Kepemilikan Keluarga terhadap Tax Avoidance”**

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan diatas mengenai hubungan antara profitabilitas, kepemilikan keluarga terhadap tax avoidance dan GAP penelitian sebelumnya dimana ada yang menyimpulkan bahwa kepemilikan keluarga signifikan negatif, tapi dalam penelitian yang menyimpulkan kepemilikan keluarga signifikan positif terhadap tax avoidance maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas dan kepemilikan keluarga memberikan dampak signifikan terhadap upaya penghindaran pajak (tax avoidance) di indonesia ?
2. Apakah Kepemilikan Institusional mampu berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atas hubungan profitabilitas dan kepemilikan keluarga terhadap Tax Avoidance.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan dengan latar belakang dan rumusan masalah sebagai mana disebutkan diatas adalah :

1. Menganalisis dan menguji secara empiris apakah profitabilitas dan kepemilikan keluarga mempunyai hubungan signifikan negatif dengan upaya penghindaran pajak (tax avoidance) di Indonesia ?
2. Menganalisis dan membuktikan apakah Kepemilikan Institusional dapat memperkuat atas hubungan profitabilitas dan kepemilikan keluarga terhadap tax avoidance / penghindaran pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang berupaya dan berkepentingan dengan pencegahan penghindaran pajak. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik :
 - 1.) Penelitian ini diharapkan dapat ,menambah khasanah dan perbendaharaan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penghindaran pajak dan upaya-upaya yang digunakan untuk mengantisipasinya.
 - 2.) Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal sebagai penelitian pendahuluan terhadap ha-hal / variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya upaya penghindaran pajak sekaligus ha-hal / variabel yang dapat mencegahnya.

2. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan tentang upaya penghindaran pajak di Indonesia dan menambah literatur tentang hubungan Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) dengan pengaruh Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi. Selain itu diharapkan juga sebagai penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan sekaligus sebagai perbandingan antara teori dengan kenyataan yang ditemukannya di lapangan.

3. Manfaat Praktis :

1.) Bagi perusahaan / Entitas bisnis

Penelitian ini diharapkan memberikan motivasi kepada manajemen dan pemegang saham untuk meningkatkan profit dengan cara yang benar, tanpa dilakukannya upaya penghindaran pajak (tax avoidance) yang akan memberikan nilai tambah positif bagi value perusahaan.

2.) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah sebagai regulator dan pemungut pajak terhadap upaya-upaya penghindaran pajak sehingga dapat menjadi celah atas upaya penghindaran pajak (tax avoidance) dengan menetapkan kebijakan maupun menyempurnakan kebijakan yang sudah ada.

BAB II

TELAAH TEORI, LITERATURE, PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN MODEL PENELITIAN

2.1. Telaah Teori / Justifikasi Teori

2.1.1. Teori Agensi (Agency Theory)

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang boleh dibilang memiliki kompleksitas tersendiri yang biasanya didalamnya menyangkut hubungan antar komponen didalamnya. Sebagai suatu organisasi perusahaan mempunyai aturan dan cara dalam membina hubungan antar komponen didalamnya. Dalam hubungan organisasi perusahaan biasanya pemegang saham memiliki peranan yang utama, tetapi seiring dengan semakin kompleknya organisasi perusahaan maka pemegang saham biasanya mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada agent yang biasa disebut juga sebagai manager. Oleh Jensen dan Meckling (1976) hal tersebut didefinisikan bahwa principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Agent atau manager inilah yang akhirnya memegang peranan penting dalam pengelolaan perusahaan dengan pengawasan tetap dilakukan oleh pemegang saham / stake holder. Hubungan antara pemegang saham dengan manager dan lemahnya pengawasan oleh pemegang saham dapat menimbulkan masalah yang bersumber dari konflik kepentingan antar keduanya. Konflik kepentingan adalah suatu kondisi dimana tujuan manager sebagai agent tidak sesuai dengan tujuan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham. Tujuan yang

diharapkan oleh pemegang saham kepada agen atau manager adalah memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Tetapi dalam kenyataannya sering kali manager juga mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham, sehingga timbullah *agency problem*.

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk menjalankan aktivitas perusahaan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen antersebut. Secara definisi lain prinsipal adalah para pemegang saham yang telah menyediakan dana, fasilitas dan hal-hal yang menyangkut operasional perusahaan untuk menjalankan perusahaan. Sedangkan agen atau manager adalah pengelola perusahaan yang diberikan mandat oleh principal untuk menjalankan operasional perusahaan tentu saja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh principal.

Dalam pendahuluan penelitian ini telah disinggung bahwa tujuan utama didirikannya perusahaan atau entitas bisnis adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau entitas bisnis itu sendiri. Setiap perusahaan memiliki tujuan jangka panjang yaitu mengoptimalkan nilai perusahaan (Wahyudi dan Prawesti, et,al 2006). Salah satu tolok ukur dari maksimal tidaknya perusahaan atau entitas bisnis dapat dilihat dari pergerakan harga sahamnya di pasaran. Semakin tinggi nilai pergerakan

harga saham dan semakin liquidnya saham yang dimiliki semakin dikatakan bahwa perusahaan atau entitas bisnis tersebut bernilai maksimal. Sehingga hal ini seterusnya akan memberikan remunerasi atau imbal balik yang positif kepada prinsipal dan agen. Principal akan menerima hasil berupa pembagian deviden, sedangkan agen atau manager akan menerima hasil berupa gaji, bonus serta berbagai macam kompensasi yang lainnya.

Tetapi dalam perjalanan perusahaan sering kali timbul asimetris informasi antara kepentingan principal dengan agen atau manager. Terkadang agen atau manager mempunyai kepentingan tersendiri dengan nilai perusahaan yang diharapkan dapat memberikan keuntungan secara sepihak kepada agen atau manager. Hal inilah yang biasanya mendorong agen / manager melakukan tindakan pengaturan laba yang secara umum biasa juga disebut sebagai manajemen laba maupun pengaturan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara melakukan manajemen pajak atau penghindaran pajak. Desai dan Dharmapala (et.al. 2006) berpendapat bahwa transaksi penghindaran pajak yang kompleks dapat memfasilitasi manajemen dengan perilaku yang oportunistik, seperti memanipulasi pendapatan, transaksi dengan pihak yang berhubungan istimewa dan aktivitas pengalihan sumber daya lainnya. Dengan pengaturan laba dan penghindaran pajak profit perusahaan dapat dibuat performa, kredibel dan dapat dijual sebagai nilai lebih dari perusahaan yang akan memberikan keuntungan kepada manajemen. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang

dimiliki oleh principal dan agen yang disebut dibagian atas sebagai asimetri informasi, terlebih pada keadaan dimana principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen karena ketidakmampuan principal memonitor aktivitas agen dalam menjalankan perusahaan. Sehingga dalam kasus ini agen mempunyai kesempatan untuk menyembunyikan beberapa informasi, terutama informasi yang berkaitan dengan kinerja agen dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal maupun pihak lain yang lebih menguntungkan buat agen.

2.1.2. Positive Accounting Theory (Teori Akuntansi Positif)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986), menjelaskan bahwa faktor faktor ekonomi tertentu bisa berhubungan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa teori akuntansi positif termasuk dalam teori keagenan Anis dan Imam (et al 2003).

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) terdapat tiga hipotesis utama yang menyertai positive accounting theory diantaranya yaitu :

1.) The Bonus Plan Hypothesis

Perusahaan yang menerapkan perencanaan pemberian bonus akan mendorong para manajernya untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat mengubah angka angka dalam akuntansi dalam pembuatan

laporan keuangannya, dengan maksud memperoleh bonus yang maksimal pada tiap tahunnya karena keberhasilan tingkat kinerja manager diukur dari perolehan laba yang dihasilkan perusahaan.

2.) The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)

Hipotesis ini berhubungan dengan ketentuan yang harus ada dan dipenuhi perusahaan atau entitas bisnis berkaitan dengan perjanjian hutang (debt covenant). Syarat ini merupakan ketentuan pokok yang mengikat debitur sampai hutang terbayarkan. Pada saat perusahaan mulai goyah dan melanggar ketentuan pokok yang mengikat hutang, maka manager berusaha untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas hutang tersebut dengan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan profit atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian hutang akan menurunkan kredibilitas manager di mata principal sehingga kebebasan manager dalam mengelola perusahaan kemungkinan akan semakin dibatasi atau bahkan tidak meangndapat kepercayaan lagi. Hal inilah yang mendorong manager untuk melakukan usaha untuk mempercantik laporan keuangan dengan peningkatan laba yang signifikan untuk menghindari atau setidaknya menunda pelanggaran terhadap perjanjian hutang.

3.) The Political Cost Hypothesis

Menurut Scott (2000) perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan maksud untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung, seperti

biaya perusahaan atas regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan perusahaan. Kasmir (2008) menyatakan profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga yang memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan, yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Kesit Bambang Prakosa (2014) menggambarkan profitabilitas merupakan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal sebagai *Return On Asset* (ROA). ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat ROA semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Lestari dan Sugiarto (2007:196) ROA merupakan pengukuran keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban

kewajiban perpajakan (Chen et al.2010). Penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) menghasilkan kesimpulan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan semakin tingginya nilai profitabilitas yang dihasilkan akan mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun.

Penghitungan atas ROA menggunakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih dan Sari 2013) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.1.4. Kepemilikan Keluarga (KK)

Kepemilikan saham keluarga dalam suatu perusahaan merupakan suatu kepemilikan yang biasanya secara khusus dipegang oleh pendiri utama atau pendiri pertama suatu perusahaan. Karena merupakan pendiri pertama kepemilikan keluarga memiliki karakteristik yang unik yang biasanya berbeda dengan kepemilikan saham yang lain, diantaranya saham yang dimiliki dapat di turunkan atau dihibahkan kepada anggota keluarga maupun keturunannya. Menurut Anderson, Mansi and Reeb et.al (2003) pemilik saham keluarga memiliki pengaruh

suara yang kuat dalam perusahaan dengan motif yang *sangat* kuat pula dalam mengelola perusahaan. Karakteristik yang membedakan dengan pemilik saham keluarga dengan pemilik saham yang lain selain saham yang diwariskan adalah perhatian keluarga atas kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang dan perhatian atas reputasi nama keluarga dan perusahaan.

Dalam hal perhatian keluarga terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang biasanya dikarenakan keinginan dari pemilik saham keluarga untuk mewariskan atau menghibahkan kepada keturunannya sehingga mereka tidak mendiversifikasikan portofolio yang dimilikinya. Dalam hal ini mereka lebih peduli terhadap usaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan (*firm value*) dari pada nilai pemegang saham (*shareholder value*). Pemilik saham keluarga memiliki pengaruh suara yang kuat dalam perusahaan dan motif yang sangat kuat untuk mengelola perusahaan (Anderson, Mansi, and Reeb et.al 2003). Sedangkan dalam hal reputasi nama keluarga dan perusahaan pemilik saham keluarga peduli atas konsekuensi ekonomi jangka panjang yang akan mereka terima dari reputasi yang berhasil mereka pertahankan dengan baik. Karena investasi keluarga bersifat jangka panjang, pihak eksternal akan menangkapnya sebagai pengelolaan yang bertahan dalam jangka panjang pula. Pihak luar akan beranggapan bahwa pengelola akan bertindak konsisten dengan nilai perusahaan di masa datang. Maka hal yang ditangkap oleh pihak luar adalah jika perusahaan melakukan opsi eksploitasi dimungkinkan di masa yang akan datang kembali akan

melakukan opsi eksploitasi dikarenakan tidak adanya perubahan pada pengelola perusahaan.

Dalam hubungannya dengan penghindaran pajak, penelitian Sari et.al (2010) tentang pengaruh karakteristik perusahaan dan tindakan pajak agresif, dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia menghasilkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Namun dari hasil regresi menunjukkan hanya pengukuran pajak agresif dengan tax plan saja yang bernilai signifikan.

Penelitian yang lain yang dilakukan *Kasipilai dan Mahertian et.al* (2013) tentang *deferred tax, earnings management dan corporate governance* pada perusahaan di Malaysia dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana struktur kepemilikan mempengaruhi earnings management perusahaan yang terlihat lewat penghindaran pajak sementara menghasilkan kesimpulan bahwa struktur kepemilikan mempunyai pengaruh atas hubungan penghindaran pajak dengan manajemen laba. Pada penelitian Kasipilai dan Mahertian et.al (2013) juga ditemukan bahwa perusahaan di Malaysia terlibat dalam strategi perencanaan pajak multi tahun pada saat terjadi penurunan tarif pajak dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2009. Pada kurun periode tersebut perusahaan publik di Malaysia memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak melalui manajemen berbagai komponen *book – tax liability*.

Disisi lain penelitian yang dilakukan Chen et.al (2010) tentang pengaruh karakteristik perusahaan keluarga terhadap pajak agresif dengan sampel 1,0003 perusahaan dalam lingkup S&P 1500 index kurun waktu 1996-2000 menunjukkan hasil bahwa perusahaan keluarga tidak lebih agresif dibanding perusahaan non keluarga dalam hal penghindaran pajak. Pemilik perusahaan keluarga terlihat lebih menjaga diri untuk tidak melakukan penghindaran pajak untuk menghindari biaya jika terjadi pemeriksaan pajak dan potensi atas sanksi pajak yang kemungkinan diterimanya yang akan berakibat langsung pada reputasi kurang baik pada nama keluarga dan nama perusahaan.

Menurut Andersen dan Reeb (2003) dalam Kesit Bambang Prakosa (2014) perusahaan keluarga (family firm) adalah setiap perusahaan yang memiliki saham yang dominan. Sedang menurut Morck dan Yeung (2004) dalam Kesit Bambang Prakosa (2014) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaanya kepada generasi berikutnya.

Adapun perhitungan dalam menentukan variabel pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak terdapat beberapa teori diantaranya menurut Kesit Bambang Prakosa (2014) mengutip pendapat Arifin et.al (2003) kepemilikan keluarga didefinisikan sebagai kepemilikan individu dan kepemilikan dari perusahaan tertutup (diatas 5

%) yang bukan perusahaan publik, negara ataupun institusi keuangan. Kepemilikan keluarga merupakan Dummy variabel yang akan bernilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga diatas 50 % dan bernilai 0 jika sebaliknya. Tetapi Faccio, 2002 dalam Starga Lamora, Vince dan Kamaliah (2013). Mendefinisikan bahwa kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham oleh individu maupun perusahaan (yang kepemilikannya tercatat) yang bukan merupakan perusahaan publik. Dan indikator pengukuran yang digunakan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Keluarga (KK)} : \frac{\text{Jumlah saham Keluarga}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.1.5. Kepemilikan Instiusional (KI)

Siregar dan Utama (2005) mendefinisikan kepemilikan instiusional sebagai kepemilikan saham oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, perbankan, dana pensiun dan invesment banking. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan instiusional adalah kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi , assets management, dan kepemilikan institusi yang lain.

Menurut Faisal (2004:199) dalam Ngadiman dan Puspitasari (2014) kepemilikan Instiusional adalah sebagai pihak yang memonitor jalannya perusahaan lebih-lebih dengan kepemilikan Intitusional yang diatas 5 % (> 5%) mengidentifikasi kemampuan yang lebih besar

pula dalam memonitor manajemen perusahaan. Adanya kepemilikan institusional dalam struktur operasi perusahaan mendorong terjadinya pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja manajemen. Tetapi pengawasan ini sangat bergantung kepada jumlah saham yang dimiliki oleh institusi, semakin besar kepemilikan saham institusional semakin optimal pula pengawasan yang dilakukannya. Dan selanjutnya akan memberikan dampak pada peningkatan kedisiplinan manajemen dalam menjalankan maupun meraih visi dan misi yang ingin dicapai perusahaan. Dengan kata lain optimalisasi terhadap pengawasan pada manajemen akan menghindarkan manajemen dari perilaku yang merugikan pemegang saham atau principal. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin kuat pula kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap operasi perusahaan.

Wahidawati (2002:5) dalam Ngadiman dan Puspitasari (2014) mendefinisikan bahwa kepemilikan institusional merupakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Semakin besar kepemilikan institusional semakin besar pula pengawasan yang akan dilakukannya. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar guna melindungi investasi mereka dalam operasi perusahaan. Pengawasan oleh pemegang saham mendorong manager mengurangi perilaku yang oportunistik sehingga konflik agensi secara langsung antara manajemen dan pemegang saham dapat diminimalkan.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi baik itu oleh institusi pemerintah, keuangan, badan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian maupun institusi yang lain, yang memiliki hak melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati et.al (2014:257) tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, kesimpulan akhirnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Pohan et.al (2009:128) juga menyatakan hasil penelitiannya bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Dua pendapat diatas didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih et.al (2012:133)

Tetapi dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh Pranata, Puspa dan Herawati et.al (2013:12) tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance hasilnya bertentangan dengan hasil penelitian diatas, menurut Pranata, Puspa dan Herawati et.al (2013:12) kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen dengan mendorong peningkatan pengawasan yang optimal. Monitoring yang dilaksanakan berkepentingan

dengan jaminan kemakmuran buat pemegang saham dan jaminan atas investasi yang telah ditanamkannya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai kelebihan diantaranya yaitu :

- 1.) Memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi yang diterimanya.
- 2.) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas operasional perusahaan

Adapun penghitungan kepemilikan institusional dijelaskan oleh Juniartii dan Sentosa et.al.2009 dengan menghitung prosentase saham yang dimiliki oleh Institusional dengan jumlah saham beredar:

$$\text{Kepemilikan Institusional (KI)} = \frac{\text{Jumlah saham Institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.1.6 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Tujuan umum didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemiliknya (principal) dan manajemen (agen) dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul. Tujuan tersebut akan dilaksanakan oleh manajemen dengan melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau laba sebesar-besarnya dan secara bersamaan menekan serta mengefisienkan beban-beban yang harus dibayar atau ditanggung oleh perusahaan. Dimana salah satu beban yang

kadang menimbulkan polemik adalah beban pembayaran pajak perusahaan. Untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, biasanya perusahaan melakukan manajemen pajak dengan cara penghindaran pajak dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan, yang biasa juga disebut sebagai *tax avoidance*. Chen (et.al 2010) "*pajak merupakan biaya yang signifikan bagi perusahaan dan pemegang saham, hal ini menjadi insentif bagi perusahaan untuk mengurangi pajak melalui aktivitas penghindaran pajak*"

Menurut Erly Suandy (2005) mendefinisikan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) sebagai berikut :

"Penghindaran pajak adalah usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun mafaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku"

Pada pendapat lain ada yang dikemukakan oleh Mohamad Zain (2008) mengutip pendapat Ernest R. Mortenson, bahwa penghindaran pajak berhubungan dengan pengaturan suatu transaksi atau kondisi atau peristiwa untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan memperhatikan konsekuensi yang ditimbulkannya. Dengan kata lain penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan dan tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang

salah, karena tindakan untuk mengurangi, meminimalisir atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang paling mungkin dalam undang-undang pajak.

Sedang menurut (Kalsen, 1997 dalam Yin dan Cheng 2004, dalam Nora Sabrina Sirait dan Dwi Martani 2014) menyatakan bahwa suatu rancangan transaksi dapat mengurangi present value dari pembayaran pajak, tetapi jika penghematan tersebut menyebabkan biaya non-pajak yang lebih besar pada area lain di organisasi, transaksi tersebut bukan merupakan perencanaan pajak yang efisien.

Balter (dalam Ngadiman dan Puspitasari 2014) mendefinisikan penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk memperkecil tingkat pembayaran pajak dalam rangka upaya peningkatan cash flow perusahaan.

Secara umum tax avoidance atau penghindaran pajak dapat diartikan sebagai suatu skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar atau menabrak ketentuan undang-undang yang berlaku dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan. Banyak juga yang berpendapat bahwa skema tax avoidance tersebut adalah tindakan yang sah dan legal dalam rangka upaya penghematan pajak.

Dalam pelaksanaan skema penghindaran pajak tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah penghematan pajak.

Penghematan pajak diharapkan dapat memberi dampak keuntungan bagi pemegang saham dan manajemen sebagai pembuat keputusan mendapatkan kompensasi dari penghematan yang telah dilakukannya. Akan tetapi di sisi yang lain penghindaran pajak melalui perencanaan pajak membutuhkan biaya transaksi, usaha dan investasi waktu yang tidak sedikit. Sebagai mana mata pisau perusahaan berharap dapat melaporkan penghasilan kena pajak yang serendah mungkin, tetapi di sisi yang lain sangat peduli terhadap tingkat laba yang dilaporkannya. Saat perusahaan berusaha melaksanakan penghindaran pajak, manajemen akan berusaha membuat penghasilan kena pajaknya serendah mungkin. Regulator atau pemerintah melalui pegawai pemeriksa pajak akan berusaha melakukan pengawasan lebih terhadap perusahaan yang melaporkan pembayaran pajak yang rendah tetapi tidak sesuai dengan omset yang diestimasikan. Hal ini menimbulkan peluang perusahaan untuk diperiksa semakin besar dengan potensi denda dan biaya pemeriksaan yang besar pula. Menurut (Klassen, et.al.1997 dalam Sirait dan Martani, 2014) satu transaksi dapat mengurangi present value dari pembayaran pajak, tetapi jika penghematan tersebut menyebabkan biaya non pajak yang lebih besar pada area lain dalam organisasi, transaksi tersebut bukan merupakan perencanaan pajak yang efisien.

Dalam penelitian Alfiyani (2013) terdapat keuntungan dan kerugian dari tindakan pajak agresif termasuk didalamnya tax avoidance yaitu :

- 1.) Keuntungan pajak agresif

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik atau pemegang saham menjadi lebih besar.
2. Keuntungan bagi manager (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
3. Keuntungan bagi manager adalah mempunyai kesempatan melakukan *rent extraction* (Chen et.al 2010)

2.) Kerugian pajak agresif

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi atau pinalty dari fiskus pajak dan turunnya harga saham perusahaan (Sari dan Martani 2010)
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dilakukan manager dalam rangka *rent extraction* (Desai dan Dharmapala, 2006)

Dari sisi tempat atau lokasi penghindaran pajak dapat terjadi juga kemungkinan penghindaran pajak antar negara dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berbeda antar negara. Menurut Darussalam

dan Dany Septriadi (2009) di beberapa negara skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi :

- 1.) Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance)
- 2.) Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance)

Perbedaan atas ketentuan perpajakan yang mungkin berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain memungkinkan terjadinya perbedaan perlakuan terhadap tax avoidance. Sehingga timbul kemungkinan dalam kasus yang sama di negara A diperkenankan tetapi di negara B tidak diperkenankan. Sehingga perusahaan multi nasional biasanya akan memanfaatkan celah dari dua peraturan perpajakan antar negara tersebut.

Secara empiris tax avoidance bisa diukur dengan menggunakan Cash ETR. Menurut Dryreng et.al (2009) Cash ETR menggambarkan semua aktivitas tax avoidance yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Hamlod dan Slemrod (2010) dalam Bernard (2011) dalam Jose Sibarani (2012) merumuskan Cash ETR sebagai berikut :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{cash_taxes_paid}}{\text{Pretax_accounting_income}}$$

Dimana :

- 1.) Cash ETR adalah tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun berjalan.
- 2.) Cash taxes paid adalah jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun berjalan.
- 3.) Pretax accounting income adalah pendapatan sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

2.2. Ikhtisar Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai penghindaran pajak (tax avoidance) telah dilaksanakan oleh peneliti peneliti sebelumnya dan mendapatkan hasil yang tidak seragam antara satu peneliti dengan peneliti yang lain, yang terlihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
01	Kesit Bambang Prakosa, 2014	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia	-Profitabilitas, kepemilikan keluarga dan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. - Komite Audit, Leverage dan kompensasi kerugian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
02	I Gusti Cahya Maharani dan	Pengaruh Corporate Governance,	Dewan komisaris, kualitas audit, komite

	Ketut Alit Suadarna, 2014	Profitabilitas, Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur	audit yang merupakan proksi dari corporate governance dan ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh negatif, risiko perusahaan yang merupakan proksi dari karakteristik eksekutif berpengaruh positif, tetapi kepemilikan institusional dari proksi CG tidak berpengaruh secara signifikan.
03	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha, 2014	Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Return On Asset dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak	ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak
04	Rinaldi Charoline Cheisviyanny, 2015	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di BEI 2010- 2013)	Profitabilitas berpengaruh signifikan positif, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif, kompensasi kerugian fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance.
05	Ngadiman dan Christiany Puspitasari	Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010- 2012	-Kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). -Leverage tidak mempunyai pengaruh signifikan pada tax avoidance.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Profitabilitas Terhadap penghindaran pajak / Tax Avoidance

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Rasio dari profitabilitas salah satunya adalah ROA (Return Of Assets. ROA adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak yang dengan kata lain merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang berhasil diraih oleh perusahaan semakin tinggi pula performa yang dicapai oleh perusahaan dengan kategori baik. Dan sebaliknya jika ROA yang berhasil diperoleh dalam kategori negatif maka boleh dikatakan laba yang diperoleh perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi. ROA negatif juga mengindikasikan bahwa kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) karena mampu mengatur pendapatan dan biaya beban yang harus dikeluarkan termasuk di dalamnya biaya pembayaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan Kesit Bambang Prakosa (2014) terhadap hipotesis bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak didapatkan data hasil pengujian koefisien regresi diangka -2,064 dan nilai $p = 0,000$ (dibawah tingkat signifikan $\alpha = 5\%$) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dapat didukung oleh data.

Dapat pula diasumsikan bahwa jika profitabilitas mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

Berangkat dari penelitian diatas serta literatur yang telah dibahas di bagian sebelumnya maka dalam penelitian ini penulis memasukkan variabel Kepemilikan Institusional sebagai pemoderasi yang memperkuat hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis yang mencoba dibangun dalam penelitian ini adalah :

H1 : ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak

H1.a :ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak ketika di moderasi oleh Kepemilikan Institusional (KI)

2.3.2. Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak / Tax Avoidance

Secara umum kepemilikan keluarga adalah perusahaan yang mayoritas saham atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh keluarga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2104) mengutip pendapat Anderson dan Reeb (2003) menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (family firm) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Sedang Mork dan Yeung

(2004) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi berikutnya.

Kesit Bambang Prakosa (2014) dalam hasil uji hipotesis terhadap pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil (-0,048) dengan (nilai $p = 0,031 < 0,05$) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dapat didukung oleh data. Hal ini menunjukkan jika kepemilikan keluarga mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan menurun. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Arifin 2003 (dalam Kesit Bambang Prakosa 2014) bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh publik atau perusahaan tanpa pengendali utama.

Berdasar pada penelitian Kesit Bambang Prakosa (2014) dan Arifin et.al (2003) maka dalam penelitian ini pengembangan hipotesis yang akan kami uji tentang pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dipadu dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi sehingga hipotesis yang dibangun menjadi

H2 = Kepemilikan Keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

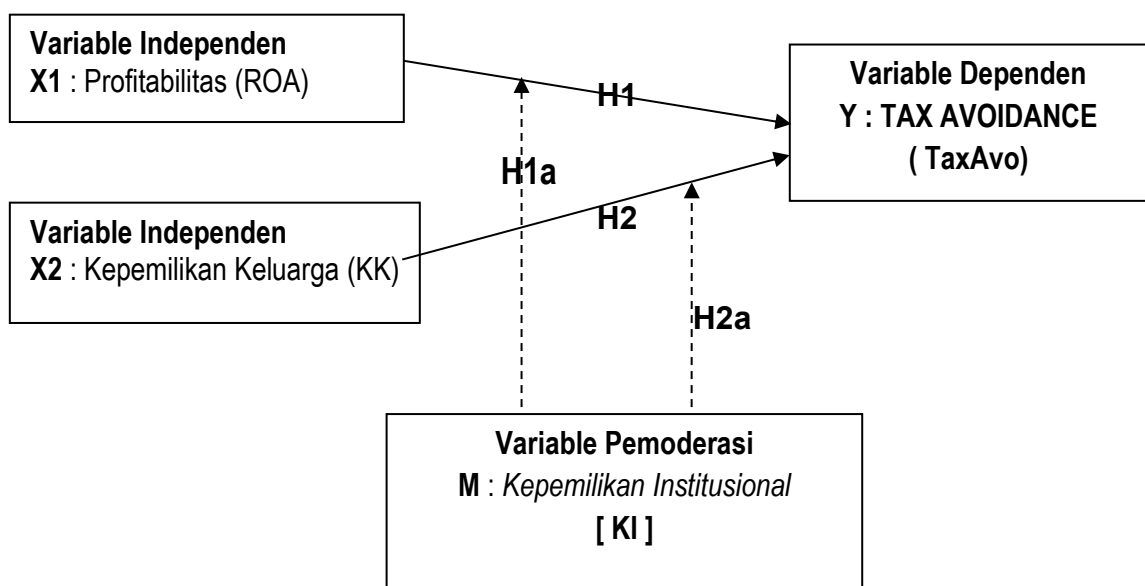
H2.a. = Kepemilikan Keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak ketika di moderasi oleh Kepemilikan Institusional (KI)

2.4. Kerangka Pemikiran, Model Penelitian Empiris dan Teoritis

Dari pengembangan hipotesis tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan hubungan antar variabel guna memperjelas keterkaitan variabel dependen, independen dan moderasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (ROA) dan Kepemilikan Keluarga (KK) sedangkan variabel Dependen adalah Penghindaran Pajak (Tax Avoidance / TaxAvo), yang dalam model penelitian digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Model Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Design Penelitian

3.1.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan disini termasuk dalam penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar dua variabel atau lebih. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji hubungan antara profitabilitas dan kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) dengan variabel kepemilikan institusional sebagai pemoderasi.

Adapun lingkup dari penelitian yang dilakukan disini adalah studi empiris terhadap data sekunder perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar atau listing dalam Bursa Efek Indonesia atas laporan keuangan yang dilaporkan antara tahun 2011 – 2014 melalui analisis terhadap data laporan neraca, rugi laba maupun catatan-catatan atas laporan keuangannya.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah satu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (*Sugiyono, 2000:55*).

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (*Sugiyono, 2010:62*).

3.3. Metode Penentuan dan Pemilihan Sampel

Sesuai dengan batasan dan ruang lingkup yang telah dijelaskan diatas maka populasi dari penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data atas semua perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia {BEI} periode 2011-2014, yang diperoleh melalui akses internet pada website www.idx.co.id. Adapun ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Winarno Surakhmad (2013) yang mendefinisikan untuk pedoman umum penentuan sampel yaitu jika populasi berada dibawah 100, maka dapat digunakan sampel sebanyak 50 % dari populasi, tetapi jika populasi berada diatas 100 dapat digunakan sampel sebesar 15 % dari total populasi. Berpedoman pada pendapat tersebut dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah minimal 15 % dari total populasi. Setelah diperhitungkan bahwa perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah berkisar 43 perusahaan. Dengan demikian pengambilan sampel yang digunakan mengacu pada jumlah 50 % dari total populasi, sehingga didapatkan hasil :

$$= 50 \% \times 43 \text{ Perusahaan}$$

= 21,50 perusahaan dengan sistem pembulatan menjadi 22 perusahaan.

Jadi estimasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 22 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia {BEI}.

Adapun dalam pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya agar diperoleh sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian atau dengan bahasa lain *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu, pengambilan data yang dianggap sesuai dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dan dalam teknik pemilihan ini tidak dilakukan secara acak, tapi dengan teknik pertimbangan (*judgement sampling*).

Adapun kriteria penentuan dan pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan sektor pertambangan sesuai dengan kategori yang dikembangkan oleh BEI yang tercantum dalam IDX Fact Book dan tidak mengalami delisting selama kurun waktu 2011 – 2014.
2. Perusahaan sektor pertambangan yang telah menerbitkan serta mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember.

3. Laporan Keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah dan perusahaan tidak berpindah sektor selama tahun yang diamati.
4. Perusahaan sektor pertambangan yang diteliti tidak mempunyai distorsi atas manfaat atau pengembalian pajak selama tahun yang diamati.
5. Perusahaan sektor pertambangan yang mempunyai pre-tax – income yang positif
6. Perusahaan sektor pertambangan yang diteliti mempunyai struktur kepemilikan saham keluarga, kepemilikan saham institusional dan pengungkapan pembayaran pajak selama periode tahun 2011-2014.

Dari kriteria penentuan sampel dapat dimungkinkan perusahaan yang diteliti jumlahnya berkurang dari sampel yang diharapkan sejumlah 22 perusahaan dikarenakan adanya perusahaan yang keluar dari kriteria yang telah ditetapkan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantono dan Supomo 2002:47). Adapun dalam pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indriantono dan Supomo, 2002:150). Peneliti dapat memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan melalui media buku, jurnal, skripsi, thesis, internet maupun media lain yang berkaitan dengan profitabilitas, struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan Institusional serta penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Seluruh data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari www.idx.co.id dan laporan tahunan yang dipublikasikan secara lengkap di bursa efek Indonesia (BEI), website perusahaan maupun data lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

3.5. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah *Construct* yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Indriantoro dan Supomo, 2009).

Pada bagian ini akan dikupas definisi dari masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian ini disertai dengan operasional dan cara pengukurannya.

3.5.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Variabel dependen adalah type variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2009:63). Pada penelitian ini yang ditetapkan sebagai variabel dependen adalah Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah kelemahan peraturan pajak tanpa melanggar undang undang pajak yang berlaku. pengukuran penghindaran pajak (tax avoidance) dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effextive Rate (Cash ETR)*. Yaitu jumlah kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Hamlod dan Slemrod (2010) dalam Bernand (2011) dalam Jose Sibarani (2012) merumuskan Cash ETR sebagai berikut :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{cash_taxes_paid}}{\text{Pretax_accounting_income}}$$

Dimana :

- 1.) Cash ETR / CeTR adalah tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun berjalan.
- 2.) Cash taxes paid adalah jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun berjalan.

3.) Pretax accounting income adalah pendapatan sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel Independen merupakan variabel bebas yang typenya adalah menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (Indriartoro dan Supomo, 2009). Sedang menurut Sugiyono at.al (2009) variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Di dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari dua proxy yaitu :

3.5.2.1 Profitabilitas (X1)

Profitabilitas diproxykan dengan *Return On Assets {ROA}* yang merupakan perbandingan dari laba bersih dengan aset perusahaan pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih dan Sari, 2013) merumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

3.5.2.2 Kepemilikan Keluarga (X2)

Perusahaan dikatakan memiliki kepemilikan keluarga apabila pimpinan atau keluarga memiliki lebih dari 20% hak suara (Andersen and Reeb, at.al. 2003; Claessens, 2000; La Porta, 1999). Menurut Harijono

at.al. (2013) penelusuran kepemilikan keluarga dilakukan dengan melihat nama dewan direksi dan dewan komisaris, jika nama dewan direksi dan dewan komisaris cenderung sama dalam beberapa tahun dan mempunyai saham dalam kepemilikan perusahaan maka bisa saja perusahaan tersebut termasuk dalam kepemilikan keluarga.

Jika perusahaan dimiliki institusi lain, maka penelusuran kepemilikan dilakukan dengan analisis kepemilikan piramida dan struktur lintas kepemilikan. Setelah dilakukan penelusuran akan diketahui bahwa jika saham pengendali perusahaan adalah individu maka perusahaan tersebut bisa dikatakan sebagai perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan keluarga.

Faccio, 2002 dalam Starga Lamora, Vince dan Kamaliah memperkuat penelitian Harjono et.al (2013) dengan mendefinisikan bahwa kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham oleh individu maupun perusahaan (yang kepemilikannya tercatat) yang bukan sebagai perusahaan publik. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan keluarga adalah persentase kepemilikan individu dan perusahaan non publik atas seluruh saham. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Kepemilikan Keluarga (KK): $\frac{\text{Jumlah saham Keluarga}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}} \times 100\%$

Jumlah Saham yang beredar

3.5.3. Variabel Moderating

Variabel moderating merupakan variabel yang mempengaruhi (meperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel moderating adalah Struktur Kepemilikan Institusional sebagai proxy Good Corporate Governace yang akan mempengaruhi hubungan Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dengan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

Siregar dan Utama (2005) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh institusi keuangan seperti asuransi, perbankan, dana pensiun dan invesment banking. Adanya kepemilikan institusional diharapkan bisa meningkatkan monitoring kinerja manajer dalam mengelola perusahaan, sehingga perilaku manajer yang sering oportunistik dengan manajemen laba dan manajemen pajak dapat ditekan. Kepemilikan Institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan (Tarjo et.al, 2008). Hal ini diperkuat dengan Juniarti dan Sentosa et.al, (2009) variabel kepemilikan institusional diukur dengan presentase kepemilikan institusi dalam struktur saham perusahaan. Jika dirumuskan menjadi sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional (KI)} = \frac{\text{Jumlah saham Institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

3.6. Operasional Variabel

Operasional Variabel dilakukan untuk penentuan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini. Operasional variabel juga dimaksudkan sebagai titik tolak dalam penentuan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga ketika dibantu dengan pengujian hipotesis menggunakan alat bantu statistik dapat diperoleh data yang tepat.

Operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.1.
Operasional Variabel

Variabel	Konsep variabel	Indikator	Skala	Acuan, No, Tahun
Profitabilitas (X1) Independen	(ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham dengan total aktiva.	<p style="text-align: center;">ROA</p> <p style="text-align: center;">= $\frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$</p>	Rasio	Penelitian Kurniasih dan Sari, 2003
Kepemilikan Keluarga (X2) Independen	Kepemilikan saham keluarga mempunyai pengaruh suara yang kuat dalam jangka panjang untuk menjaga nama baik keluarga dan perusahaan dengan menghindari tindakan pajak agresif	<p style="text-align: center;">KK</p> <p style="text-align: center;">: $\frac{\text{Jumlah saham Keluarga}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}} \times 100\%$</p>	Rasio	Penelitian Harijono, 2013
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Dependen)	Cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.	<p style="text-align: center;">Cash ETR</p> <p style="text-align: center;">= $\frac{\text{cash taxes paid}}{\text{pretax accounting income}}$</p>	Rasio	Hamlod dan Slemrod (2010) dalam Bernard

	Cash ETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak,			(2011) dalam Jose Sibarani (2012)
Kepemilikan Institusional (KI) Moderating	Adanya kepemilikan institusional diharapkan bisa meningkatkan monitoring kinerja manajer dalam mengelola perusahaan, sehingga perilaku manajer yang sering oportunistik dengan manajemen laba dan manajemen pajak dapat ditekan	(KI) =$\frac{\text{Jumlah saham Institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$	Rasio	Penelitian Jose Sibarani

3.7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah perhitungan statistik dengan penerapan SPSS (*Statistical Product and Services Solutions*) for windows 20. Setelah data data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness

(kemelencengan distribusi) Ghozali et.al.2013. Jadi analisis deskriptif dalam penelitian ini untuk memberi gambaran yang jelas mengenai, profitabilitas, kepemilikan saham keluarga, kepemilikan saham institusional dan penghindaran pajak (tax avoidance)

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Hasil yang ingin didapat dari uji asumsi klasik adalah untuk memastikan bahwa nilai dari parameter dan estimator yang ada bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Dengan kata lain mendapatkan parameter yang bersifat linear, tidak bias dan varians minimum. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1). Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti pada uji t dan F mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.

1.1). Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara

data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian dengan hanya melihat histogram untuk sampel yang kecil kadang menyesatkan. Olehkarena itu dapat digunakan metode *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Pada uji normalitas dengan sistem grafik dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik tersebut .

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

Tetapi jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

1.2). Analisis Statistik

Untuk menambah hasil pengujian normalitas, maka dapat digunakan uji statistik dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai Kolmogorov-Smirnov memiliki tingkat signifikan diatas $\alpha > 0,05$ berarti regresi memenuhi asumsi normalitas.

2). Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Jika terdapat korelasi antar variabel independen maka variabel yang dimaksud tidak ortogonal,

variabel yang tidak ortogonal antara variabel independennya sama dengan nilai nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model, peneliti akan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan tabel matrik korelasi (*coefficient correlations*) dengan alat bantu program *Statistik Product and Service Solution* (SPSS).

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $<0,10$ atau sama dengan nilai VIF >10 . Bila nilai *tolerance* $<0,10$ atau sama dengan VIF <10 , berarti tidak ada multikolonieritas antar variabel dalam model regresi.

Demikian dengan tabel matrik korelasi (*coefficient correlations*) yaitu dengan melihat nilai korelasi antar variabel independennya. Jika bernilai diatas 90%, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas yang serius begitu pula sebaliknya (Ghozali, et.al 2013).

3). Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ atau sebelumnya, (Ghozali,et.al.2013). Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan *Run Test* digunakan untuk menguji apakah antara residual

terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak ada hubungan korelasi, maka dapat dikatakan bahwa residual acak atau random (Ghozali, et.al.2013). Suatu model dinyatakan bebas autokorelasi dalam uji *Run Test* apabila tingkat signifikansi residual yang diuji berada diatas tingkat probabilitas sebesar 5%.

4). Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain, (Ghozali, et.al 2013). Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, (Ghozali,et.al.2013). Untuk mendeteksi ada atau tidak nya heteroskedastisitas, dapat dilakukan melihat ada atau tidaknya pola tertentu grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED.

3.7.3. Uji Hipotesis dengan Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisis data adalah cara mengelolah data yang telah terkumpul kemudian dapat memberikan interprestasi. Hasil pengelahan data ini digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi moderasi. Uji interaksi atau sering disebut dengan ***Moderated Regression Analysis (MRA)***

merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi, (Ghozali, 2009).

Tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Terdapat tiga model pengujian regresi dengan variabel moderating, yaitu uji interaksi (MRA), uji nilai selisih mutlak, dan uji residual. Dalam penelitian ini akan digunakan uji interaksi MRA, hipotesis moderating diterima jika variabel moderasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Uji interaksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel Kepemilikan Institusional dapat mempengaruhi profitabilitas dan kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*. Berikut persamaan analisis regresi moderasi (Ghozali, 2009) :

$$Y = \alpha + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 * M + \beta_4 X_2 * M + e(1)$$

Keterangan :

Y : *Tax Avoidance*

α : konstanta

β_2 - β_4 : Koefisien regresi

X1 : Profitabilitas

X2 : Kepemilikan Keluarga (KK)

M : Kepemilikan Institusional (KI)

e : *error term*

Bila pada persamaan nilai koefisien regresi β_3 memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka Kepemilikan Institusional mampu bertindak sebagai variabel moderasi.

Variabel perkalian antara β_2 dan X2, β_3 dan X1 dikalikan variabel moderating oleh karena menggambarkan pengaruh moderating variabel M3 terhadap hubungan X1 dan Y, X2 dan Y. sedangkan variabel X1, dan X2, merupakan pengaruh langsung dari variabel X1, X2 terhadap Y. Selain itu, variabel moderasi mempunyai empat jenis moderasi, berikut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.2.
Pedoman Kategori Hasil Uji Variabel Moderating

Hasil Penelitian Aziz, 2015

No	Hasil Uji	Jenis Moderasi
1	β_2 non significant β_3 significant	Moderasi Murni (<i>Pure Moderator</i>)
2	β_2 non significant β_3 significant	Moderasi Semu (<i>Quasi Medorator</i>). Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.
3	β_2 significant β_3 non significant 3.5.5.3. U j	Prediktor Moderasi (<i>Predictor Moderasi Variabel</i>). Artinya variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel predictor (independen) dalam model hubungan yang dibentuk.
4	β_2 non significant β_3 non significant i	Moderasi Potensial (<i>Homologiser Moderator</i>). Artinya variabel tersebut potensial menjadi variabel moderasi

3.7.4. Statistik f

Pada dasarnya Uji Statistik f untuk melihat apakah semua variabel independen atau bebas yang di masukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel independen. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansi biasanya di tingkat 0,05. Jika hasil dalam tabel anova dalam kolom sig dengan nilai probabilitas < 0.05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama sama antara variabel bebas terhadap variabel dependen.

Namun jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.7.5 Uji Statistik t

Pengujian ini digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance), jika probabilitas nilai t atau signifikan $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4. 1. Deskripsi Objek atau Sample Penelitian

Sampel atau objek dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu tahun 2011 – 2014 dengan fokus observasi pada perusahaan publik sektor pertambangan. Kurun waktu yang dipilih diatas (4 tahun) diharapkan mampu memberikan gambaran atas hubungan profitabilitas, kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Adapun data yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Proses penentuan sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu bara	23
Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Minyak & Gas Bumi	9
Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Logam & Mineral Lain	9
Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Batuan	2
Total Jumlah Perusahaan Sub Sektor Pertambangan	43
Perusahaan yang tidak lengkap Laporan Keuangannya kurun waktu tahun pengamatan 2011-2014 (4 tahun)	(15)
Perusahaan yang mempunyai laba bersih sebelum pajak (-)	(16)
Jumlah sampel perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian	12

Sumber : Hasil pengolahan data sendiri (2017)

Dari semua perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar aktif di Bursa Efek Indonesia dalam periode penelitian kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 diketahui sebanyak 43 perusahaan publik yang terbagi dalam sub sektor pertambangan batubara sebanyak 23 perusahaan, sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi sebanyak 9 perusahaan, sub sektor logam dan mineral lain sebanyak 9 perusahaan dan sub sektor batu batuan sebanyak 2 perusahaan.

Rincian perusahaan yang dikeluarkan dari sampel adalah 15 perusahaan yang tidak mempunyai laporan keuangan lengkap dalam periode penelitian dan 16 perusahaan yang mengalami laba bersih sebelum pajak negatif dalam kurun tahun penelitian 2011 sampai dengan 2014. Sehingga kriteria perusahaan yang dapat dijadikan sampel adalah sebanyak 12 perusahaan dengan time series 4 tahun sehingga observasi penelitian yang diamati berjumlah 68 data observasi.

Variabel dependen yang digunakan adalah Penghindaran Pajak (TaxAvo / CETR) dengan variabel independen Profitabilitas (ROA) dan Kepemilikan Keluarga (KK) dengan pengujian Kepemilikan Institusional (KI) sebagai pemoderasi.

Tabel 4.2
Daftar Data Sampel Penelitian

No.	Kode Nama Perusahaan	Tahun	ROA	KK	KI	CeTR
1.	ADRO	2011	0,125	0,159	0,439	0,449

2.	ADRO	2012	0,057	0,160	0,439	0,463
3.	ADRO	2013	0,034	0,152	0,439	0,453
4.	ADRO	2014	0,023	0,151	0,439	0,436
5.	GEMS	2011	0,130	0,670	0,300	0,252
6.	GEMS	2012	0,052	0,670	0,300	0,086
7.	GEMS	2013	0,057	0,670	0,003	0,267
8.	GEMS	2014	0,034	0,670	0,003	0,279
9.	HRUM	2011	0,395	0,704	0,000	0,232
10.	HRUM	2012	0,300	0,705	0,000	0,241
11.	HRUM	2013	0,101	0,707	0,000	0,213
12.	HRUM	2014	0,006	0,707	0,000	0,646
13.	KKGI	2011	0,466	0,003	0,663	0,297
14.	KKGI	2012	0,227	0,003	0,629	0,338
15.	KKGI	2013	0,163	0,003	0,629	0,314
16.	KKGI	2014	0,080	0,003	0,649	0,373
17.	ARTI	2011	0,008	0,609	0,093	0,158
18.	ARTI	2012	0,036	0,609	0,093	0,086
19.	ARTI	2013	0,042	0,609	0,093	0,018
20.	ARTI	2014	0,017	0,813	0,000	0,136
21.	ESSA	2011	0,186	0,553	0,000	0,223
22.	ESSA	2012	0,064	0,553	0,394	0,275
23.	ESSA	2013	0,106	0,514	0,071	0,303
24.	ESSA	2014	0,074	0,514	0,071	0,236
25.	INCO	2011	0,138	0,593	0,202	0,262

26.	INCO	2012	0,119	0,593	0,202	0,262
27.	INCO	2013	0,017	0,593	0,206	0,303
28.	INCO	2014	0,074	0,593	0,202	0,273
29.	RUIS	2011	0,003	0,643	0,156	0,724
30.	RUIS	2012	0,025	0,435	0,364	0,399
31.	RUIS	2013	0,023	0,478	0,130	0,474
32.	RUIS	2014	0,044	0,499	0,171	0,285
33.	TINS	2011	0,137	0,000	0,650	0,293
34.	TINS	2012	0,071	0,000	0,650	0,333
35.	TINS	2013	0,074	0,000	0,650	0,297
36.	TINS	2014	0,069	0,000	0,962	0,338
37.	PETRO	2011	0,140	0,985	0,000	0,206
38.	PETRO	2012	0,093	0,698	0,000	0,227
39.	PETRO	2013	0,034	0,777	0,000	0,373
40.	PETRO	2014	0,005	0,800	0,000	0,898
41.	CTTH	2011	0,004	0,066	0,522	0,448
42.	CTTH	2012	0,093	0,066	0,522	0,137
43.	CTTH	2013	0,034	0,066	0,522	0,749
44.	CTTH	2014	0,005	0,066	0,522	0,574
45.	MITI	2011	0,233	0,150	0,046	0,198
46.	MITI	2012	0,149	0,150	0,046	0,208
47.	MITI	2013	0,140	0,150	0,046	0,207
48.	MITI	2014	0,021	0,126	0,209	0,357

Sumber : Hasil pengolahan data sendiri (2017)

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan bantuan SPSS Statistics dengan beberapa proses pengujian yang dilakukan menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi serta pengujian variabel moderating (MRA) dengan uji interaksi.

4.2. Statistik Deskriptif

Gambaran umum tentang perusahaan yang diteliti bisa dilihat dari hasil statistik deskriptif yang diolah melalui pengujian SPSS dengan mengetahui gambaran mengenai nilai minimum, maximum, mean, dan std.deviation yang akan mencerminkan kondisi perusahaan yang menjadi objek penelitian. Adapun statistik deskriptif mengenai penelitian sub sektor pertambangan tersaji sebagai berikut :

Tabel 4.3

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	48	,001	,466	,09190	,098734
KK	48	,000	,985	,40496	,299486
KI	48	,000	,962	,26519	,257652
CeTR	48	,018	,898	,32498	,172286
Valid N (listwise)	48				

Keterangan :

- ROA : Return On Asset proksi dari Profitabilitas Variabel Independent (X1)
- KK : Kepemilikan Keluarga, Variabel Independent (X2)
- KI : Kepemilikan Institusional, Variabel moderasi (M)
- CeTR : Penghindaran pajak, Tax Avoidance, Variabel dependent (Y)

Dari hasil tabel statistik deskriptif diatas dengan data sampel sejumlah 48 dari 12 perusahaan yang diolah didapat gambaran sebagai berikut :

- 1.) Profitabilitas yang diproyeksikan sebagai ROA memberikan gambaran bahwa dari total aset yang dimiliki 12 perusahaan sampel hanya mampu menghasilkan profitabilitas rata-rata sebesar 0,09190 atau hanya 9,00 % dengan nilai minimum sebesar 0,001 dan nilai maksimum sebesar 0,466, hal ini berarti dari 12 perusahaan terdapat satu perusahaan yang hanya mampu menghasilkan profitabilitas sebesar 0,1 % yaitu PT. Citatah Tbk pada tahun 2013 dan sebaliknya ada pula satu perusahaan yang mampu mendayagunakan aset yang dimilikinya sehingga berhasil memperoleh profitabilitas maksimum sebesar 46,6 % yang ditunjukkan oleh PT. Resources Alam Indonesia Tbk pada tahun 2011. Perusahaan yang lain memproyeksikan profitabilitas $\geq 0,3$ % pada periode pengamatan tahun 2011 sampai dengan 2014. Dari standar deviasi sebesar 0,098734 menunjukkan tidak ada perusahaan sampel yang berkinerja buruk.

- 2.) Kepemilikan Keluarga (KK) dalam perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 0,40496 yang menggambarkan rata-rata besarnya kepemilikan saham keluarga 40,50 % dan kepemilikan saham keluarga minimum digambarkan sebesar 0,000 atau 0 % yang ditunjukkan oleh PT. Timah Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2011 dan 2012, pada tahun 2013

dan 2014 ada kepemilikan saham keluarga yang diberikan pada direksi tetapi jumlahnya tidak signifikan dengan total saham beredar sehingga hasilnya tetap 0,000. Kepemilikan saham keluarga yang tertinggi di gambarkan dengan nilai sebesar 0,985 atau 98,50 % yang dimiliki oleh PT. Petrosea Tbk pada tahun 2011.

3.) Kepemilikan Institusional (KI) merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh Institusional yang dalam tabel statistik deskriptif diatas mempunyai nilai rata-rata dari jumlah perusahaan sampel sebesar 0,26519 yang berarti sama dengan 26,52 % dari standar deviasi yang ada 0,257652. Kepemilikan institusioan yang minimum digambarkan sebesar 0,000 atau 0 % diproyeksikan oleh 2 perusahaan yaitu PT. Harum Energy Tbk dan PT. Petrosea Tbk dalam kurun waktu pengamatan tahun 2011 – 2014. Sedangkan nilai kepemilikan Institusional tertinggi / maksimum digambarkan sebesar 0,962 atau 96,2 % yang diproyeksikan oleh PT. Timah Tbk pada tahun 2014 yang merupakan BUMN yang dimiliki oleh Institusi negara Republik Indonesia.

4.) Proksi CeTR yang merupakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) atas perusahaan yang diteliti mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,32498 dari standar deviasi 0,172286 atau senilai 32,50 %. Hal ini dapat membuktikan bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia cukup

kecil dengan rata-rata hanya 32,50 %. Adapun nilai terendah / minimum dari CeTR yang digambarkan tabel sebesar 0,018 atau nilai pembayaran pajak sebesar 0,18 % diproyeksikan oleh PT. Ratu Prabu Energy Tbk pada tahun 2013, sedang nilai CeTR tertinggi atau maksimum sebesar 0,898 atau nilai pembayaran pajak sebesar 89,8 % diproyeksikan oleh PT. Petrosea Tbk pada tahun 2014. Semakin rendah nilai CeTR yang diperoleh mengindikasikan semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan begitupun sebaliknya semakin tinggi nilai CeTR mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut menekan terjadinya penghindaran pajak.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

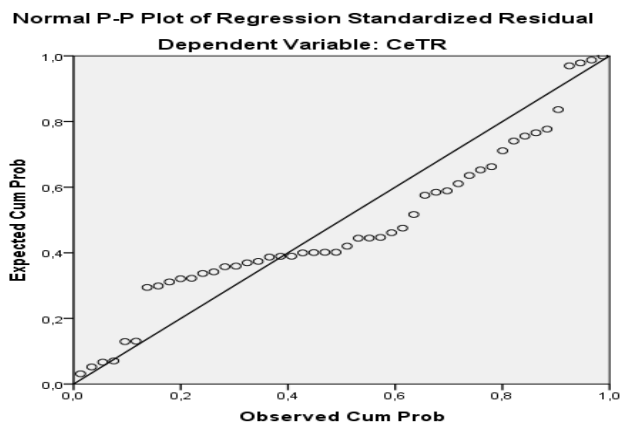
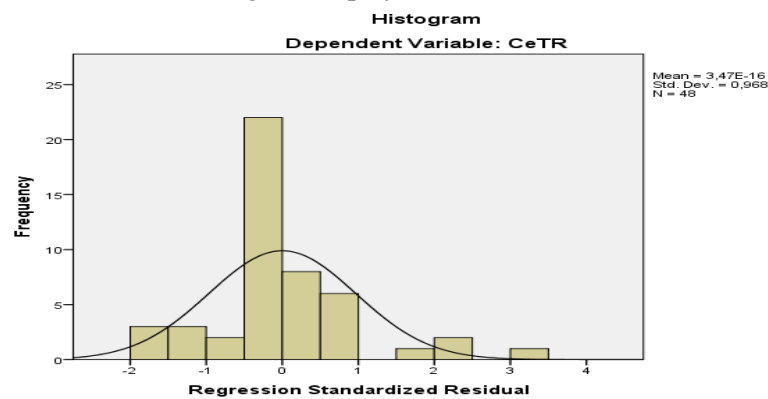
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali (2015) model regresi yang baik adalah distribusi data secara normal atau mendekati normal. Dengan grafik probability plot akan diketahui bahwa jika ada (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal akan menunjukkan pola distribusi normal sehingga model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas.

Dari uji normalitas yang dilakukan diketahui bahwa data tidak terdistribusi secara normal dengan pola kemencengan ke arah kanan,

sehingga data dapat dikatakan data terdistribusi tidak normal. Oleh karena itu data harus di transform dulu. Dan sesuai dengan bentuk kemencengan termasuk dalam kategori Moderat Positive Skewness yang harus ditransform menggunakan SQRT.

Data sebelum transform terlihat sebagai berikut :

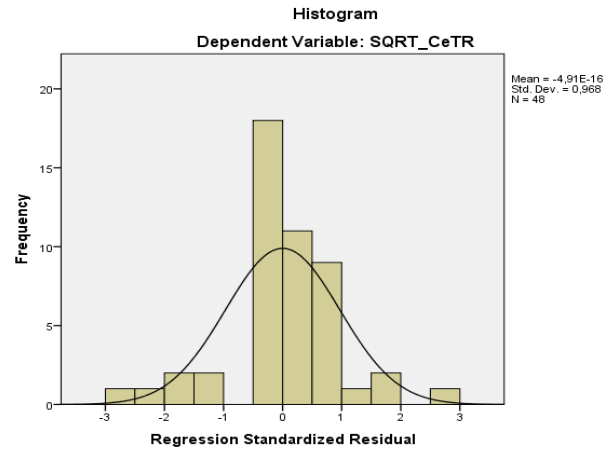
Gambar 4.1 Histogram display normal curve – tidak normal



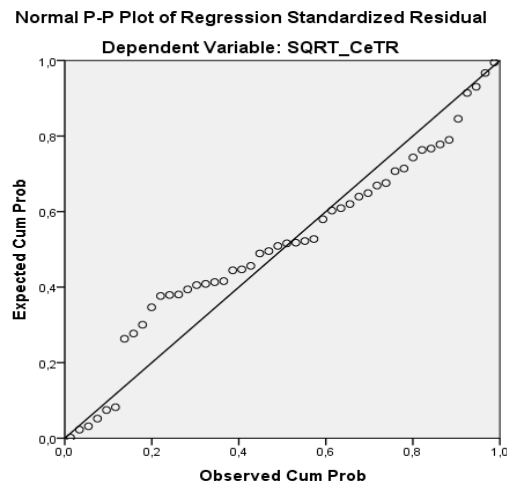
Gambar 4.2

Kurva P-Plot Regression Standarized Residual - tidak normal

Data setelah dilaksanakan transformasi sesuai data histogram terlihat sebagai berikut :



Gambar 4.3
Histogram Display Normal Curve - normal



Gambar 4.4
Kurva P-Plot regression standarrized residual - Normal

Data setelah dilakukan transformasi mengindikasikan data normal sebagaimana terlihat pada gambar 4.3 terlihat bahwa kemiringan pada grafik cenderung seimbang. Hal ini juga terlihat pada kurva P-Plot pada gambar 4.4 dimana titik terlihat menyebar di sekitar garis horisontal dan mengikuti arah garis horisontal tersebut.

Selain dengan Histogram dan Kurva P-Plot, uji normalitas data dapat dilakukan juga dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan asumsi jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 (Nilai hitung Sig. >

0,05) maka dapat dipastikan data tersebut berdistribusi normal, tetapi bila data mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan tidak berdistribusi normal.

Dari pengujian yang dilaksanakan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		48
	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,16078009
Most Extreme Differences	Absolute	,163
	Positive	,151
	Negative	-,163
Kolmogorov-Smirnov Z		1,131
Asymp. Sig. (2-tailed)		,155

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari data tabel 4.4 tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digambarkan berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,155 yang menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10 (Sig. 0,155 > 0,10).

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Batas *Tolerance* value adalah 0,10 dengan batas *VIF* adalah 10. Apabila hasil analisis menunjukkan nilai *VIF* dibawah 10 dan *tolerance* diatas 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas sehingga model reliabel sebagai dasar untuk analisa. Demikian pula jika hasil yang didapatkan sebaliknya.

Tabel 4.5.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,517	,068		7,640	,000		
SQRT_ROA	-,691	,188	-,601	-3,671	,001	,636	1,573
SQRT_KK	-,021	,095	-,038	-,220	,827	,573	1,747
ROAxKI	,847	,648	,253	1,308	,198	,454	2,205
KkxKI	-,407	,409	-,141	-,995	,326	,852	1,173

a. Dependent Variable: CeTR

Hasil yang diperlihatkan pada tabel 4.5 diatas diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (*VIF*) dari variabel Independen ROA (*X1*) sebesar 1,573, sedang variabel Independen KK (*X2*) sebesar 1,747, dimana dua-duanya menunjukkan angka < 10. Adapun nilai *tolerance* dari

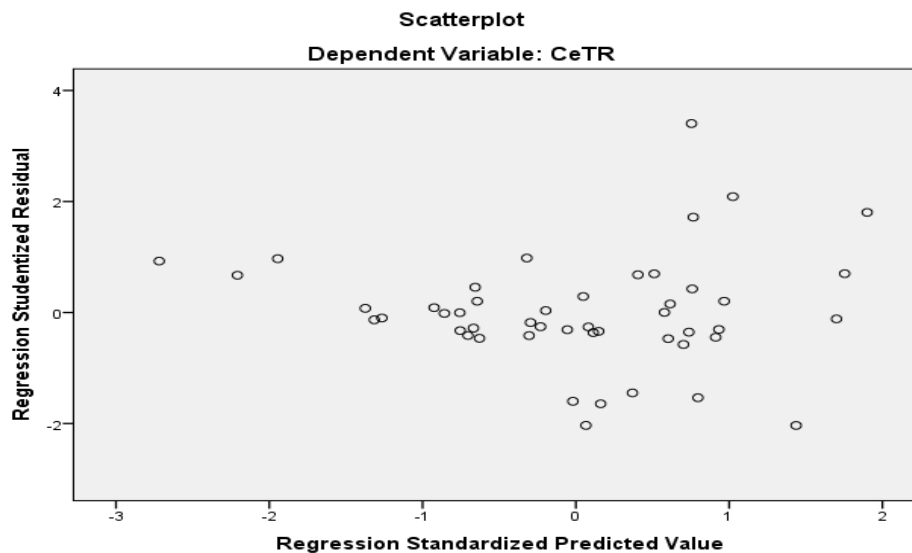
ROA (X1) adalah 0,636 sedangkan KK (X2) mempunyai nilai 0,573 keduanya menunjukkan nilai $> 0,10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada gejala heteroskedastisitas di dalam model penelitian ini, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Adanya gejala heteroskedastisitas menyebabkan errornya menjadi tidak konsisten. Model penelitian yang baik adalah model penelitian yang variasinya seragam sehingga errornya konsisten. Menurut Ghazali (2005) cara memprediksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola gambar scatterplot dari model tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut

- 1.) Titik titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0 (nol).
- 2.) Titik-titik data mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
- 3.) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- 4.) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola

Gambar 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari pola gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar diatas, dibawah dan disekitar angka 0 (nol), serta tidak membentuk suatu pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

4.3.4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson. Suatu model dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai durbin watson (DW) dari t-hitung lebih besar dari batas nilai t-tabel (du) dengan nilai signifikansi sebesar 5 %.

Tabel 4.6
Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,479 ^a	,229	,177	,156334	,229	4,360	3	44	,009	2,099

a. Predictors: (Constant), KI, SQRT_ROA, SQRT_KK

b. Dependent Variable: CeTR

Dari hasil uji pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,099, nilai batas atas (du) dihitung dengan $(k;n-k) = (2;48-2) = (2 : 46)$ dalam tabel sebesar 1,628, selanjutnya $t\text{-hitung} > t\text{-tabel} = 2,099 > 1,628$. Dengan demikian asumsi data dalam penelitian benar tidak terjadi autokorelasi.

4.4. Pengujian Hipotesis dan Hasil Statistik

4.4.1. Uji Signifikansi Kelayakan Model (uji-F)

Uji statistik F pada bertujuan untuk menunjukkan bahwa semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol ($H_0 : b_1=b_2=.....b_k=0$) dengan artian apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (H_a) tidak semua parameter sama dengan

nol ($H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$) artinya semua variabel merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika hasil regresi memperlihatkan nilai p-value (sig.) lebih kecil dari nilai signifikan yang ditentukan yaitu 0,05 % maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun hasil uji-F atas variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7.
Hasil Uji - F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,373	4	,093	3,924	,008 ^b
	Residual	1,022	43	,024		
	Total	1,395	47			

a. Dependent Variable: CeTR

b. Predictors: (Constant), KkxKI, ROAxKI, SQRT_ROA, SQRT_KK

Dari data yang dihasilkan dalam tabel 4.7 dapat dilihat signifikansi (sig.) menunjukkan angka sebesar 0,009 masih dibawah 0,050. F-hitung sebesar 3,924, sedang di dalam tabel F-tabel diitung dari $d = (k:n-k) = (2:48-2) = (2:46)$ sehingga $d = 50$, $\alpha = 0,5$ maka didapatkan data F-tabel = 3,180. Dengan demikian F-hitung > F-tabel dan kesimpulannya adalah ROA dan KK secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CeTR).

4.4.2. Uji Koefisien Determinan (R²)

Uji Koefisien Determinan (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Jika R² sama dengan 1 maka variasi variabel independen yang ada dalam model menjelaskan 100% variasi dependen (Priyatno, 2010). Nilai R square dikatakan baik jika diatas 0,5 hal tersebut karena R square berkisar antara 0 sampai 1. Adapun hasil spss dari model penelitian ini adalah :

Tabel 4.8.
Uji Koefisien Determinan (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,479 ^a	,229	,177	,156334

a. Predictors: (Constant), KI, SQRT_ROA, SQRT_KK

b. Dependent Variable: CeTR

Dari data tabel diatas diketahui bahwa besaran adjusted R² adalah 0,479 yang berarti sebanyak 47,9% varian Tax Avoidance dapat dijelaskan oleh variabel independen ROA, KK dan KI. Sedangkan sisanya sebanyak 52,10 % dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Standard error of the estimate diketahui sebesar 0,156334 yang berarti semakin tepat variabel independen memprediksi variabel dependen, karena semakin kecil nilai SEE semakin besar mempengaruhi variabel dependen. Adjusted R Square 0,229 berarti sebanyak 22,9 % tax avoidance mampu diprediksi oleh profitabilitas dan kepemilikan keluarga sisanya 77,10 % diprediksi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4.3. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji – t)

Uji Statistik t adalah pengujian yang menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Dalam hipotesis nol (H_0) dengan persamaan ($H_0 : b_i = 0$) yang hendak diuji apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedang hipotesis alternatif H_a parameter suatu variabel tidak sama dengan nol ($H_a : b_i \neq 0$) adalah bahwa variabel yang diuji merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan selanjutnya apabila nilai sig. $< 0,05$ serta nilai t-hitung $> t$ -tabel maka dapat dikatakan variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini tabel yang dihasilkan sebagai berikut :

Tabel 4.9.
Hasil Uji - t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	,499	,144		3,460	,001
	SQRT_ROA	-,522	,158	-,453	-3,311	,002
	SQRT_KK	-,084	,149	-,152	-,563	,576
	KI	,040	,179	,060	,223	,825

a. Dependent Variable: CeTR

Dari formasi tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Uji – t pada penelitian ini adalah :

1. Nilai signifikansi untuk ROA variabel X1 adalah 0,002 yang berarti < dari 0,05 atau < dari 0,10. Nilai t-Hitung untuk variabel ROA (X1) sebesar 3,311 (negatif) dan nilai t-Tabel $(\alpha/2;n-k-1) = (0,05/2 : 48-2-1) = (0,03 : 45) = 2,0141$, sehingga t-hitung masih lebih besar dari t-tabel ($3,311 > 2,014$) dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ROA (X1) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Tax Avoidance. Dari output coefficients (β) tabel diatas dapat dilihat nilai regresi variabel ROA sebesar 0,522 dan bernilai negatif sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance, dengan arti lain semakin tinggi tingkatan profitabilitas yang dicapai perusahaan semakin menurun tingkat penghindaran pajaknya.
2. Nilai signifikan untuk KK (X2) sebesar 0,576 (> 0,10) dan t-hitung sebesar 0,563 bernilai negatif sehingga dapat disimpulkan T-tabel $(\alpha/2;n-k-1) = (0,10/2 : 48-2-1) = (0,05; 45) = 1,6794$ sehingga t-hitung < t-tabel ($0,563 < 1,6794$) hasilnya bahwa kepemilikan keluarga (KK) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) dalam arti lain KK (X2) bukan merupakan variabel penjelas dari Tax Avoidance.
3. Nilai signifikansi untuk KI (M) adalah 0,825 > dari 0,10 , dengan nilai t-hitung sebesar 0,223 bernilai negatif dan rumus t-tabel dihitung $(\alpha/2;n-k-1) = (0,10/2;48-2-1) = (0,05;45) = 1,6794$. Sehingga persamaan akhrit t-hitung $0,223 < t\text{-tabel } 1,6794$ dapat disimpulkan

juga bahwa KI (variabel moderasi) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

4.4.4. Uji Moderate Regression Analysis

Variabel moderating adalah variabel bebas yang diharapkan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antar variabel independen lain terhadap variabel dependen. Penelitian MRA biasanya menggunakan uji interaksi, uji selisih mutlak dan uji residual. Uji MRA diharapkan dapat menjawab hasil dari uji – t. Dari hasil MRA didapat tabel sebagai berikut :

Tabel 5.0.
Hasil Uji MRA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,373	4	,093	3,924	,008 ^b
	Residual	1,022	43	,024		
	Total	1,395	47			

a. Dependent Variable: CeTR

b. Predictors: (Constant), KKxKI, ROAxKI, SQRT_ROA, SQRT_KK

Dari hasil diatas dapat dilihat nilai signifikan $0,008 < 0,050$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi interaksi pada model penelitian ini sehingga Kepemilikan Institusional (KI) berlaku sebagai variabel moderating atas interaksi ROA (X1) dan KK (X2) terhadap variabel dependen (Tax Avoidance).

Pengujian variabel moderating dengan uji interaksi ataupun dengan uji nilai mutlak mempunyai kecenderungan terjadinya multikolinieritas yang tinggi antar variabel, sehingga harus dipastikan dulu

data yang akan diuji terbebas dari multikolinieritas. Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Hasil Uji Interaksi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,517	,068		7,640	,000
SQRT_ROA	-,691	,188	-,601	-3,671	,001
SQRT_KK	-,021	,095	-,038	-,220	,827
ROAxKI	,847	,648	,253	1,308	,198
KkxKI	-,407	,409	-,141	-,995	,326

Dari data tabel diatas dapat sekaligus dilakukan pengujian terhadap hipotesis dengan melihat hasil nilai hitung uji Moderate Regression Analysis sebagai berikut :

1.) H1 : ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)

Hasil hitung nilai coefficients B ROA sebesar -0,691 dengan nilai negatif dan nilai signifikan sebesar 0,001 yang $< 0,05$ atau $< 0,10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA (X1) sebagai Proksi dari profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance selanjutnya hipotesis H1 diterima. Coefficients ROA negatif mempunyai arti bahwa ketika profitabilitas mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan berlaku sebaliknya dengan terjadinya tingkat penurunan penghindaran pajak.

2.) H1a : ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak ketika di moderasi oleh Kepemilikan Institusional (KI)

Hasil hitung dari ROAxKI yaitu ROA setelah dimoderasi oleh KI mempunyai Coefficients sebesar 0,847 dan bernilai positif dengan signifikansi sebesar 0,198 > dari 0,05 dan > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance tetapi setelah di moderasi oleh Kepemilikan Institusional (KI) menjadi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Jadi kesimpulan akhirnya KI tidak mampu bertindak sebagai variabel moderator dalam hubungan ROA dengan Tax Avoidance (H1a ditolak).

3.) H2 : Kepemilikan Keluarga (KK) berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)

Hasil hitung dari Coefficients KK (X2) adalah sebesar 0,021 dengan nilai negatif dan nilai signifikan 0,827 > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel KK (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (H2 : ditolak)

4.) H2a : Kepemilikan Keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak ketika di moderasi oleh Kepemilikan Institusional (KI)

Hasil hitung Coefficients KK x KI setelah interaksi adalah 0,407 dengan nilai negatif dan tingkat signifikan 0,326 mempunyai nilai > 0,010 sehingga dikatakan bahwa KI tidak mampu menjadi moderator atas

hubungan Kepemilikan Keluarga (KK) terhadap Tax Avoidance. (H2a = ditolak)

4.5. Pembahasan Hasil

4.5.1. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Signifikansi yang bernilai negatif (-) pada hipotesis H1 dapat diterjemahkan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas yang mampu dihasilkan suatu perusahaan akan maka akan berbanding terbalik dengan proses penghindaran pajak. Semakin perusahaan mempunyai profit yang tinggi akan semakin turun tingkat penghindaran pajaknya. Dengan usaha menekan praktik penghindaran pajak setelah perusahaan memperoleh performa profit yang tinggi adalah wujud dari salah satu usaha manajemen untuk mempertahankan nilai perusahaan ataupun malah dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Profit tinggi, perusahaan yang taat hukum, menjamin terjaganya performa perusahaan yang di mata investor tentu saja akan memberikan nilai / value yang excelent. Sehingga kinerja perusahaan di masa depan sudah tergambar dan tidak diperlukan untuk melakukan penghindaran pajak yang dapat menambah beban biaya pajak dan selanjutnya akan mempengaruhi nilai pasar dari perusahaan tergambar dari nilai perusahaannya. Dalam penelitian terhadap 12 perusahaan sampel di sektor pertambangan terbukti bahwa ROA atau Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap

penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prakosa, Kesit Bambang (2014).

4.5.2. Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran pajak

Kepemilikan Keluarga dalam penelitian sampel terhadap perusahaan publik sektor pertambangan menghasilkan kesimpulan bahwa Kepemilikan saham Keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak / tax avoidance. Kemungkinan dari hasil yang berbeda dikarenakan fokus pengamatan yang berbeda dengan sampel perusahaan yang berbeda. Peneliti terdahulu memfokuskan penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur sedangkan penulis hanya meneliti satu sektor yaitu sektor pertambangan.

Yang kedua karakteristik perusahaan pertambangan jelas berbeda dengan perusahaan yang lain. Penganggaran biaya survey dan biaya riset tentu saja akan memakan biaya yang cukup tinggi, sedangkan hasil yang didapat ada dua kemungkinan, yaitu lokasi yang di survey dan diriset memang berpotensi mempunyai kandungan bahan tambang sesuai yang diharapkan atau bahkan sebaliknya lokasi yang telah disurvey dan diriset dengan biaya tinggi tidak mengandung bahan tambang yang optimal, sehingga perusahaan harus mengalihkan usahanya di tempat lain, biaya explorasi yang tidak segera menghasilkan break even point dan biaya konsesi lahan pertambangan yang sarat

dengan biaya birokrasi serta terbatasnya kandungan bahan tambang yang suatu saat akan habis memungkinkan kepemilikan keluarga pada perusahaan pertambangan berpikir skeptis terhadap kelangsungan jangka panjang usaha di bidang pertambangan, khususnya dalam upaya mempertahankan perusahaan untuk dapat diwariskan kepada anak keturunannya. Sehingga hipotesis bahwa semakin tinggi kepemilikan keluarga akan dapat menekan penghindaran pajak dengan asumsi kepemilikan keluarga akan mempertahankan nilai dan nama baik keluarga dengan menghindari pajak agar perusahaan berumur panjang sehingga bisa dilanjutkan oleh anak keturunannya tidak terbukti pada perusahaan sektor pertambangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen et.al....(2010)

4.5.3. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan ketika di moderasi oleh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas perusahaan pertambangan mampu berpengaruh signifikan negatif terhadap upaya penghindaran pajak. Tetapi ketika variabel ini di moderasi oleh Kepemilikan Institusional hasil yang didapat malah menjadi tidak signifikan. Hal ini membuktikan bahwa kepemilikan Institusional tidak dapat menguatkan hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan pula bahwa kepemilikan Institusional tidak menjalankan fungsinya secara kontrol kepada manajemen dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan institusional hanya tercatat dalam status pemegang saham tetapi tidak memfungsikan

dirinya sebagai mana yang diharapkan sebagai komponen pengontrol atas beroperasinya perusahaan. Hal ini dimungkinkan bisa disimpulkan setelah dilaksanakan penelitian lanjutan yang membuktikan apakah kepemilikan institusional yang ada adalah afiliasi dari anak perusahaan yang mengelola tambang. Seandainya hal ini benar maka kepemilikan institusional hanyalah upaya penyertaan saham dengan kepercayaan penuh bahwa perusahaan induk mampu bertindak dengan benar dalam mengelola perusahaan. Atau kemungkinan lain perusahaan afiliasi yang meyakini modalnya dalam kepemilikan institusional mempunyai power yang lebih kecil, dengan suara yang minoritas sehingga dalam pengambilan keputusan mempunyai keterbatasan dan tidak dapat bertindak objektif dan independen. Kepemilikan Institusional masih belum jelas antara kepemilikan saham dan fungsi kontrol sehingga tugas kepemilikan institusional sebagai monitor dan pengawasan terhadap kinerja manajemen tidak dapat dijalankan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sartika Widya (2012).

4.5.4. Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak setelah dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional.

Sebelum mendapatkan moderasi Kepemilikan Keluarga pada perusahaan publik sektor pertambangan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Setelah mendapatkan moderasi

kepemilikan keluarga tetap tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap upaya penghindaran pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan Institusional tidak mampu menjadi moderasi bagi kepemilikan usaha dalam upaya penghindaran pajak. Kemungkinan karena kesimpulan di bab sebelumnya ataupun karena keduanya tidak bisa menjalankan fungsi kontrol yang baik atas pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen. Hasilnya sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sartika Widya (2012)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Tujuan awal dari penelitian ini adalah untuk meneliti kembali pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak dimana pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada perusahaan manufaktur dengan hasil Profitabilitas (ROA) dan Kepemilikan Keluarga (KK) berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Dan dalam penelitian ini penulis mencoba menggali kembali pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Keluarga dengan fokus pada perusahaan sektor pertambangan, dengan 12 sampel perusahaan yang memenuhi syarat penelitian dalam kurun waktu pengamatan empat tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan 2014.

Dan hasil yang didapat dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance (penghindaran pajak), hal ini membuktikan semakin tinggi profitabilitas perusahaan sektor pertambangan akan semakin kecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.
2. Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance (penghindaran pajak), membuktikan bahwa kepemilikan keluarga bukan sebagai variabel yang menjelaskan terhadap penghindaran pajak.

3. Hasil uji Interaksi membuktikan bahwa Kepemilikan Institusional tidak mampu bertindak sebagai pemoderasi dalam hubungan antara profitabilitas, kepemilikan keluarga dengan tax avoidance (penghindaran pajak).

5.2. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tentu saja masih jauh dari sempurna dan tidak tertutup adanya keterbatasan yang melingkupinya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meminimalisir keterbatasan yang ada. Beberapa saran yang bisa penulis ungkapkan diantaranya :

1. Disarankan penelitian mendatang melakukan penelitian selain variabel ROA (Profitabilitas), seperti Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Mayoritas, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen, Kualitas Audit sebagai mekanisme kontrol dalam melakukan penghindaran pajak.
2. Melanjutkan tahun sampel dari 2015 dan 2016 dan memperluas cakupan sampel penelitian seperti perusahaan Perbankan, Jasa, Otomotif ataupun manufaktur supaya hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi terhadap upaya penghindaran pajak.
3. Menggunakan pengukuran penghindaran pajak selain CeTR. Seperti menggunakan Tax Shield dan Agressivitas Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, R., Mansi, S., Reeb, D. (2003). Founding-family ownership and the agency cost of debt. *Journal of Financial Economics* 68, 263-285.
- Anissa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih. (2012). "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance" *Jurnal Akuntansi dan Auditing, Volume No. 2*
- Budiharto, Sutrisno. (2013). Indonesia ini Kaya, Tapi Kenapa Miiskin ; Ada Apa dengann Tambangnya ?
<http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2013/12>
- Budiman dan Setiyono, (2012). "Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
- Chen Shuping, Cheng Qiang; and Shevlin Terry (2010) "Are Family firms more Tax Aggressive than non-family firms ? *Journal of Financial Economics. Vol 91,*
- Desai, M.A., and Dharmapala, D . (2006). "Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics, 79,*
- Dyreng, Scott D.; Hanlon, Michelle; Maydew Edward L, (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance, *The Accounting Review, 83, 61-82.*
- Faccio, Mara . (2006). Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96 (1);
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoror
- Harijono, Daniel. (2009). "Reaksi Pasar Terhadap Publikasi Laporan Laba dan Dampaknya Terhadap Saham Perusahaan Nonreporter: Studi Empiris Di Bursa Efek Indonesia". *Skripsi*, Universitas Katolik Sugijapranata. Tidak dipublikasikan. Semarang.
- Home, James C. Van dan Jhon Wachowicz, Jr, 2005. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*, Buku Satu, Edisi Kedua Belas, Alih Bahasa oleh Dewi Fitrasari dan Deny Amos Kwary, Salemba Empat, Jakarta.
- Indriartono, dan Supomo, (2002) *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976). "Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol 3, h. 305-360

- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari (2013). "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance, *Jurnal Akuntansi Vol. 8 No. 1*.
- La Porta, Rafael; Lopez-De Silanes, (1999), Corporate Ownership Around The World, *Journal of Finance*, 54, 471-518.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana, (2004). " Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2* (2014) : 525-539
- Mangoting, Yenni, (1999). "Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif meminimalkan Pajak". *Jurnal Akuntansi Keuangan Vol. 1 No. 1*, Mei 1999: 43-53.
- Morck, Randall. K., dan Yeung, Bernard, (2004). *Family Control And The Rent Seeking Society. Entrepreneurship: Theory and Practice* 28, 391-409.
- Ngadiman dan Christiany Puspitasari. (2004). "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2010-2012). *Jurnal Akuntansi Vol. 18 No. 03, September 2014: 408-421*.
- Pohan, Hotman. T. (2009) "Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik" *Jurnal Informasi, Perpajakan dan Akuntansi dan Keuangan Publik (4)* 113-135.
- Prakosa, Kesit Bambang (2014). " Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia" *SNA 17 Mataram, September 2014*.
- Prasiwi, Kristantina Wahyu (2015), "Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi" *Skripsi Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Diponegoro*. Tidak dipublikasikan Semarang 2015
- Rinaldi, dan Cheisviyanny, C. (2015) "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013) *SNEMA Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang 2015*
- Sari, D. K., dan Martani, D. (2010) "Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 13*, Padang, hal. 1-34

- Sartika, Widya. (2012) “ Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. Tidak dipublikasikan Jakarta 2012
- Sirait, Nora Sabrina dan Martani, D. (2014) “Pengaruh Perusahaan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia” *SNA 17 Mataram Lombok, 24-27 September 2014*
- Suandy, Erly. (2008) “*Perencanaan Pajak*”. Edisi 4, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono, (2010).” *Metode Penelitian Bisnis*” Penerbit Alfabeta Bandung
- Supomo, (2014) “*Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*” Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2014) “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. Penerbit Alfabeta Bandung
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 pasal 11. Tentang Keuangan Negara. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Perubahan ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Jakarta;Kemenkeu*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18. Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta: Kemenkeu*
- Wahidahwati. (2002) “Pengaruh Kepemilikan Manjerial dan Kepemilikan Institusional Pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Theory Agency”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. (5), hal. 1-16.
- Wahyudi, Untung dan H. P. Pawestri, (2006), “Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Inverting “, *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006*.
- Watts, RL., and J. L. Zimmermen. (1986). “*Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*”. *The Accounting Review*, 60 (1): 131-156.
- Zain, Mohammad. (2008) “*Manajemen Perpajakan*” Edisi 3, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

[http://www.bps.go.id/link Tabel Statis/view/id/1286.indo_13_1](http://www.bps.go.id/link_Tabel Statis/view/id/1286.indo_13_1)

<http://www.idx.co.id>

Siaran pers Kemenkeu Tanggal 05/01/2016

<http://www.pajak.go.id> / tax amnesty

Daftar Gambar dan Tabel

Gambar :

- 1.1. Gambar Model Penelitian
- 4.1. Histogram Normal Curve – tidak normal
- 4.2. Kurva P-Plot – tidak normal
- 4.3. Histogram Display Normal Cuve – normal
- 4.4. Kurva P=Plot – normal
- 4.5. Scatterplot

Tabel :

- 3.1. Operasional Variabel
- 3.2. Pedoman Kategori Hasil Uji Variabel Moderating
- 4.1. Proses Penentuan Sampel
- 4.2. Daftar Data Sampel Penelitian
- 4.3. Deskriptif Statistik
- 4.4. Hasil Uji Kolmogorov – Smirnov
- 4.5. Hasil Uji Multikolinieritas
- 4.6. Hasil Uji Autokorelasi / Durbin Watson
- 4.7. Hasil Uji – F

- 4.8. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)
- 4.9. Hasil Uji – t
- 5.0. Hasil Uji MRA
- 5.1. Hasil Uji Interaksi

**EFEKTIVITAS KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL ATAS HUBUNGAN
PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TAX
AVOIDANCE**

{Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Listed di BEI}

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Magister Akuntansi Jenjang Strata Dua Pada Program Studi Pasca
Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SWADAYA



Disusun Oleh :

Nama : HARI UJIANTARA
NIM : 14731804

**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA MAGISTER AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
JAKARTA 2016**



LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

EFEKTIVITAS KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL ATAS HUBUNGAN PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TAX AVOIDANCE

{Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listed di BEI}

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NAMA : HARI UJIANTARA
NIM : 14731804

Telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Akuntansi pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
“Swadaya” Jakarta

Nama	Tanggal	Tanda Tangan
<u>Dr. Ilyas Saad, MA.</u> Direktur Program		
<u>Dr. Syahril Djaddang, SE, M.Si, AK, CA</u> Pembimbing 1		
<u>Dra. Sulastri, MM</u> Pembimbing 2		



LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI TESIS

EFEKTIVITAS KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL ATAS HUBUNGAN PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TAX AVOIDANCE

{Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listed di BEI}

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NAMA : HARI UJIANTARA
NIM : 14731804

Telah diuji oleh Dewan Penguji Pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2017 dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Pasca Sarjanan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Swadaya" Jakarta

Menyetujui :

NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Drs.H. Hasanuddin, MSi.</u> Ketua STIE Swadaya		
<u>Dr. Syahril Djaddang, SE, M.Si, AK,</u> <u>CA</u> Penguji 1		
<u>Dra. Sulastri, MM</u> Pembimbing 2		



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARI UJIANTARA
Tempat Tanggal Lahir : Magelang , 13 September 1969
Mahasiswa : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Swadaya” Jakarta
Program Studi : Pasca Sarjana Magister Akuntansi (Maksi)
Nomor Induk Mahasiswa : 14731804

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya ajukan dengan judul :

**EFEKTIVITAS KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL ATAS HUBUNGAN
PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TAX
AVOIDANCE**

{Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listed di BEI}

Adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program magister akuntansi ini ataupun pada program lainnya, Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya berada dipundak saya. Apabila kemudian hari ternyata ini tidak benar maka saya bersedia untuk ditinjau dan menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan sebenar benarnya.

Jakarta, Februari 2017

Hari Ujiantara
NIM : 14731804

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah memberikan ruang, waktu, kesempatan dan kesehatan serta atas semua limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “ EFEKTIVITAS KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL ATAS HUBUNGAN PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TAX AVOIDANCE {Studi empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Listed di BEI}”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan teladan bagi umatnya, salah satunya dengan mengajarkan membaca Al Qur'an untuk mendapat hidayah dan ilmu.

Dalam pembuatan Tesis ini penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis juga menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penyempurnaan tentu saja masih terbuka maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan input dan masukan baik itu berupa saran maupun kritik yang membangun.

Selanjutnya perkenankan pula dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan baik itu secara langsung maupun tidak langsung atas terselesaikannya tesis ini, terutama kepada :

1. Keluargaku, Istri dan ananda Naylin yang telah memberikan support dan dukungan yang luar biasa.

2. Mendiang Ibu Mertua Ibunda Bahniar Bakar yang sampai akhir hayatnya memberikan dukungan moril kepada penulis.
3. Bapak Drs. H. Hasanuddin, MSi selaku Ketua STIE SWADAYA
4. Bapak Dr. Ilyas Saad, MA selaku Direktur Program Pasca Sarjana STIE SWADAYA.
5. Bapak Dr. Syahril Djaddang SE, MSi AK, CA selaku Kepala Program Studi Maksi STIE SWADAYA dan sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan penyempurnaan Tesis ini
6. Ibu Dra. Sulastri MM, selaku Pembimbing II memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar program studi Maksi STIE SWADAYA
8. Civitas dan Akademika STIE SWADAYA
9. Teman-Teman seperjuangan, Mbak Indah, Pak Nana, Pak Budi, Pak Arifin, dan terutama Mas Broo Ambar yang telah memberikan dukungan dan support yang luar biasa.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya.

Akhir Kata semoga Tesis yang telah penulis susun dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi Perpajakan.

Jakarta, Maret 2017

Penulis

